



Tahun Anggaran

2026



PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)

KABUPATEN BANTUL

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : B/900.1.1/06060/DPRD/2026
NOMOR : B/900.1.1/00520/DPRD/2026

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
Alamat Kantor : Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : H. HANUNG RAHARJO
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Bantul
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul
- b. Nama : SURADAL
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul
- c. Nama : TITIS AJENG GANIS MARETI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul
- d. Nama : AGUNG LAKSMONO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan APBD, diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi: perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2026, Perubahan terhadap kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026.

Bantul, 13 Agustus 2026

BUPATI BANTUL
Selaku,
PIHAK PERTAMA

ABDUL HALIM MUSLIH

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
Selaku,
PIHAK KEDUA


H. HANUNG RAHARJO
KETUA


SURADAL
WAKIL KETUA


TITIS AJENG GANIS MARETI
WAKIL KETUA


AGUNG LAKSMONO
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA	3
1.4. Sistematika	6
BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	8
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	8
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	18
BAB III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	21
3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN 2026	21
3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD 2026	23
BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	29
4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2026	29
4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	32
BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	35
5.1. Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja	35
5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga	36
BAB VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	97
6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	97
6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	97

BAB VII. STRATEGI PENCAPAIAN 101

7.1. Permasalahan Pembangunan Daerah Tahun 2026 101

7.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 106

7.3. Standar Pelayanan Minimal (SPM) 125

7.4. Strategi Pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah 128

BAB VIII. PENUTUP 131

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2021-2025 dan Target Tahun 2026	12
Tabel 2.2	Capaian Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2025 dan Target Tahun 2026	14
Tabel 2.3	Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul Tahun 2021-2025 dan Target Tahun 2026	15
Tabel 2.4	Capaian Rasio Gini Kabupaten Bantul Tahun 2021-2025 dan Target Tahun 2026	16
Tabel 2.5	Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul Tahun 2021-2025 dan Target Tahun 2026	17
Tabel 3.1	Indikator Ekonomi Makro di Indonesia Tahun 2026	21
Tabel 3.2	Penyandingan Target Indikator Ekonomi Makro Tahun 2026	23
Tabel 4.1	Realisasi Pendapatan Tahun 2022 s.d 2025, Pendapatan APBD Tahun 2026, Realisasi Pendapatan Semester I Tahun 2026, dan Proyeksi/Target Perubahan Pendapatan Tahun 2026 di Kabupaten Bantul	33
Tabel 5.1	Realisasi Belanja Tahun 2022 s.d 2025, Belanja APBD Tahun 2026, Realisasi Belanja Semester I Tahun 2026, dan Proyeksi/Target Perubahan Belanja Tahun 2026 di Kabupaten Bantul	37
Tabel 5.2	Rekapitulasi Rencana Perubahan Anggaran pada Perangkat Daerah dalam Perubahan APBD Tahun 2026...	39
Tabel 5.3	Rekapitulasi Perubahan Anggaran SPM	42

Tabel 5.4	Rekapitulasi Perubahan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2026	71
Tabel 5.5	Dukungan Kabupaten Bantul terhadap Prioritas Nasional	96
Tabel 6.1	Realisasi Pembiayaan Tahun 2022 s.d 2025, Pembiayaan APBD Tahun 2026, Realisasi Pembiayaan Semester I Tahun 2026, dan Proyeksi/Target Perubahan Pembiayaan Tahun 2026 di Kabupaten Bantul	98
Tabel 6.2	Rincian APBD Tahun 2026 dan Proyeksi Perubahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026	99
Tabel 7.1	Matriks Perumusan Masalah Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026	102
Tabel 7.2	Penyelarasan Tema dan Prioritas Nasional dengan Prioritas Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026.....	107
Tabel 7.3	Penyelarasan Tema dan Prioritas DIY dengan Prioritas Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026	108
Tabel 7.4	Interkoneksi Pendekatan Prioritas, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Bantul dengan Program Unggulan dan Program Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul	109
Tabel 7.5	Interkoneksi Program Strategis Nasional (ProSN) dengan Program Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul	116
Tabel 7.6	Jenis dan Indikator Pelayanan SPM yang Harus Dipenuhi	125

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Sesuai ketentuan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- d. keadaan darurat; dan
- e. keadaan luar biasa.

Perubahan APBD yang disebabkan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan KUA. Hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD tersebut diformulasikan oleh kepala daerah ke dalam perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan PPAS APBD berdasarkan perubahan RKPD.

Perumusan perubahan RKPD Tahun 2026 yang akan menjadi acuan Perubahan KUA perlu memperhatikan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih dan memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara kepala daerah dan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/ atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.

Perubahan KUA Kabupaten Bantul Tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026, dan evaluasi hasil sampai dengan Triwulan I Tahun 2026. Hasil evaluasi digunakan untuk mengetahui:

- a. Realisasi fisik dan keuangan yang terserap antara target yang direncanakan dengan laporan realisasi APBD setiap Triwulan.

- b. Capaian sasaran daerah yang ditunjukkan dari evaluasi pelaksanaan dan hasil program kegiatan yang mendukung sasaran daerah.

Jumlah belanja daerah sampai dengan Semester I 2026 mengalami peningkatan sebesar Rp28.265.725.194,00 menjadi Rp2.471.823.139.162,89 dari APBD Murni sebesar Rp2.443.557.413.968,89 dikarenakan adanya perubahan/pergeseran anggaran yaitu terkait DAK, DAIS, DBH CHT, BKK Pemda DIY, dan gaji dan tunjangan, dengan serapan anggaran pada Semester I 2026 mencapai Rp1.077.178.709.873,86 atau sekitar 43,57% terhadap total belanja.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2026 sampai dengan Triwulan I, menunjukkan bahwa perlu dilakukan beberapa penyesuaian dalam KUA Tahun 2026, sebagai berikut:

- a. Perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, antara lain disebabkan oleh pergeseran antar rekening belanja menyesuaikan Berita Acara Dana Keistimewaan, Surat Edaran Gubernur DIY tentang Penganggaran BKK Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, penyesuaian DBH CHT, dan penyesuaian gaji dan tunjangan;
- b. Pemenuhan peningkatan proyeksi pendapatan dan kebutuhan pergeseran anggaran kegiatan pada Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan serta konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Pemerintah Kabupaten Bantul perlu menyusun perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2026 berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2026.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2026 adalah:

- a. memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD;
- b. mempertajam dan menyesuaikan prioritas kebijakan pembangunan; dan
- c. melakukan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui penambahan, pengurangan, dan pergeseran anggaran, baik antar kegiatan, maupun antar jenis belanja.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Dasar hukum penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2026 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 268);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);

20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bantul;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 34);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2026 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran;
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
26. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor B/900.1.1/06060/DPRD/2026 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor B/900.1.1/00520/DPRD/2026 tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.

1.4. Sistematika

Penyajian penulisan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)
- 1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA
- 1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA
- 1.4 Sistematika

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- 2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

- 1.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN
- 1.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

- 4.1. Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang akan diproyeksikan untuk tahun anggaran 2026
- 4.2. Perubahan target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

- 5.1. Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja
- 5.2. Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

- 6.1. Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan
- 6.2. Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN**BAB VIII PENUTUP**

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Bantul tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2021-2026 dan diselaraskan dengan RKP 2026 dan RKPD DIY tahun 2026. Arah kebijakan ekonomi daerah menjadi dasar kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan.

Kerangka ekonomi makro tahun 2026 disusun berdasarkan kondisi perekonomian Kabupaten Bantul pada tahun 2025 dan Semester I tahun 2026, masalah-masalah yang harus diselesaikan dan tantangan yang harus dihadapi, serta tujuan yang ingin dicapai pada tahun mendatang untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera. Kerangka ekonomi makro meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pengangguran, kemiskinan, distribusi pendapatan serta arah kebijakan keuangan daerah. Secara umum kondisi ekonomi Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh kondisi capaian indikator makro ekonomi Nasional dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.1.1 Kondisi Capaian Indikator Makro Ekonomi Nasional

Perang di Timur Tengah memperburuk kondisi dan prospek perekonomian global. Serangan Israel dan AS ke Iran yang diikuti dengan serangan pembalasan Iran sejak akhir Februari 2026 makin menekan prospek pertumbuhan global. Melonjaknya harga minyak dan komoditas dunia berdampak negatif terhadap rantai pasok perdagangan antarnegara sehingga menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi dunia dan meningkatkan tekanan inflasi global. Pertumbuhan ekonomi dunia pada 2026 diperkirakan lebih lambat menjadi 3,1% dari prakiraan sebelumnya sebesar 3,2%, meskipun terjadi penurunan tarif resiprokal AS. Tekanan inflasi global meningkat dari 3,8% menjadi 4,1%, sehingga mempersempit ruang penurunan kebijakan moneter global, termasuk makin tertundanya penurunan *Fed Funds Rate* (FFR). *Yield US Treasury* terus meningkat akibat membengkaknya defisit fiskal AS.

Di tengah tingginya ketidakpastian global dan beratnya tantangan perekonomian domestik akibat eskalasi konflik di Timur Tengah,

perekonomian Indonesia pada triwulan I 2026 tetap menunjukkan ketahanan yang baik dan perlu terus diperkuat agar mampu tumbuh lebih tinggi secara berkelanjutan. Ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 5,61% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,39% (yoy), ditopang oleh kuatnya permintaan domestik, termasuk konsumsi rumah tangga pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1447 H, stimulus Pemerintah, dan peningkatan investasi. Kinerja eksternal tetap terjaga dengan surplus neraca perdagangan barang pada triwulan I 2026 sebesar 5,5 miliar dolar AS ditopang oleh surplus perdagangan nonmigas di tengah defisit neraca perdagangan migas, sementara aliran modal asing tercatat net outflow sebesar 0,8 miliar dolar AS akibat tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Posisi cadangan devisa pada akhir Maret 2026 tetap tinggi sebesar 148,2 miliar dolar AS. Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS pada akhir Maret 2026 melemah 1,88% (ptp) dibandingkan level akhir Desember 2025 dipengaruhi penguatan dolar AS dan keluarnya aliran modal asing dari emerging markets. (Bank Indonesia, *Laporan Kelembagaan Bank Indonesia Triwulan I - 2026*).

Berdasarkan Bank Indonesia (2026) Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan I 2026 tetap menunjukkan ketahanan di tengah perlambatan ekonomi global dan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan internasional. Defisit transaksi berjalan tetap berada pada level rendah, sementara transaksi modal dan finansial masih mencatat defisit yang terkendali. Secara keseluruhan, NPI pada triwulan I 2026 mencatat defisit sebesar 9,1 miliar dolar AS. Meskipun demikian, posisi cadangan devisa Indonesia tetap kuat pada akhir Maret 2026 sebesar 148,2 miliar dolar AS, yang mampu membiayai sekitar 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional.

Di tengah dinamika geopolitik dan meningkatnya ketidakpastian pasar global yang mendorong penguatan dolar AS, nilai tukar Rupiah tetap menghadapi tekanan. Pada triwulan II 2026, Rupiah mengalami pelemahan dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2025. Nilai tukar Rupiah bergerak dari sekitar Rp16.670 per dolar AS pada akhir 2025 menjadi sekitar Rp18.173 per dolar AS pada Juni 2026, seiring meningkatnya tekanan di pasar keuangan global dan penguatan dolar AS.

Pada Juni 2026, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat sebesar 3,34% (year-on-year/yoy), dengan nilai IHK sebesar 111,89. Inflasi tersebut dipengaruhi oleh peningkatan harga pada seluruh kelompok pengeluaran. Beberapa kelompok yang mengalami kenaikan harga antara lain kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,67%; kelompok transportasi sebesar 4,57%; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mencatat kenaikan tertinggi sebesar 10,10%. Selain itu, kenaikan harga juga terjadi pada kelompok pengeluaran lainnya, meliputi pakaian dan alas kaki, perumahan, perlengkapan rumah tangga, kesehatan, informasi dan komunikasi, rekreasi, pendidikan, serta penyediaan makanan dan minuman/restoran. (Badan Pusat Statistik (BPS), Perkembangan Indeks Harga Konsumen Juni 2026).

2.1.2 Kondisi Capaian Indikator Makro Ekonomi Daerah Istimewa

Yogyakarta

Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada triwulan I tahun 2026 mengalami pertumbuhan sebesar 5,84 persen secara tahunan (y-on-y). Peningkatan ekonomi ini terjadi di hampir seluruh sektor lapangan usaha, dengan pengecualian sektor Jasa Keuangan dan Asuransi yang justru mengalami kontraksi sebesar 0,79 persen. Pertumbuhan tertinggi tercatat pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,59 persen, kemudian diikuti oleh sektor Jasa Lainnya sebesar 10,34 persen dan sektor Konstruksi sebesar 7,60 persen. Di sisi lain, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang menjadi salah satu sektor dengan kontribusi terbesar tetap mencatat pertumbuhan positif sebesar 2,25 persen. Sementara itu, sektor Industri Pengolahan tumbuh sebesar 5,94 persen. (Badan Pusat Statistik (BPS), Pertumbuhan Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta Triwulan I-2026).

Dari perspektif pengeluaran, pertumbuhan ekonomi DIY sebesar 5,84 persen pada Triwulan I tahun 2026 secara tahunan (y-on-y) terutama didukung oleh peningkatan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P). Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh realisasi belanja pemerintah, khususnya melalui pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini memberikan dorongan terhadap aktivitas sektor riil sekaligus mendukung pemberdayaan UMKM lokal. Selain itu, peningkatan konsumsi rumah tangga yang terjadi selama periode Ramadhan dan Idul Fitri turut memperkuat pertumbuhan ekonomi DIY. Faktor-faktor tersebut membantu

menjaga stabilitas perekonomian DIY di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global.

Dibandingkan dengan Triwulan I tahun 2025, seluruh komponen pengeluaran dalam perekonomian DIY pada Triwulan I tahun 2026 mencatat pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yang meningkat sebesar 20,08 persen. Peningkatan ini terutama didorong oleh tingginya realisasi belanja program MBG serta pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN, TNI, dan Polri pada periode tersebut.

Selain PK-P, pertumbuhan yang cukup tinggi juga terjadi pada komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), masing-masing tumbuh sebesar 9,11 persen dan 7,35 persen. Pertumbuhan PK-LNPRT dipengaruhi oleh momentum Ramadhan dan Idul Fitri yang meningkatkan aktivitas masyarakat dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui berbagai lembaga sosial. Sementara itu, pertumbuhan PMTB didorong oleh pembangunan berbagai proyek infrastruktur, seperti jalan tol dan gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di sejumlah wilayah DIY. Pembangunan tersebut menjadi penggerak sektor konstruksi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada Juni tahun 2026, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami inflasi (y-on-y) sebesar 2,91 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 111,68. Inflasi y-on-y tersebut terjadi akibat adanya peningkatan harga yang tercermin dari kenaikan indeks pada seluruh kelompok pengeluaran. Beberapa kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan antara lain kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,54 persen; pakaian dan alas kaki sebesar 2,02 persen; perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,94 persen; perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,54 persen; serta kelompok kesehatan sebesar 0,96 persen.

Selain itu, kenaikan harga juga terjadi pada kelompok transportasi sebesar 3,87 persen; informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,98 persen; rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,80 persen; pendidikan sebesar 2,21 persen; penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,54 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mencatat kenaikan tertinggi sebesar 14,71 persen.

Pertumbuhan ekonomi DIY di tahun 2026 diperkirakan semakin terakselerasi dibandingkan tahun 2025 karena adanya Proyek Strategis Nasional yang berlokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2026 diproyeksikan berada pada kisaran 5,10-5,90% utamanya dipengaruhi oleh aktivitas domestik yang berpotensi lebih kuat seiring dengan keberlanjutan program pembangunan ekonomi oleh kabinet baru. Sejalan dengan hal tersebut, inflasi DIY pada tahun 2026 diproyeksikan berada pada kisaran 2,1-3,5%. (Rencana Kerja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026).

2.1.3 Kondisi Capaian Ekonomi Makro Kabupaten Bantul

Pada Perubahan KUA Tahun 2026, Kabupaten Bantul melakukan penyesuaian terhadap indikator makro ekonomi dengan memperhatikan kondisi DIY, Nasional dan capaian tahun 2025.

2.1.3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur perekonomian suatu negara/daerah. Besarnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Daerah yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan kemampuan daerah membawa kondisi perekonomian relatif lebih baik. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2025 dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul
Tahun 2021-2025 dan Target Tahun 2026

Uraian	Satuan	Capaian					Target RKP	Target Perubahan RKP
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,00	5,19	5,06	5,04	4,92	5,28-5,51	5,28-5,51

Sumber: P RKPD Kabupaten Bantul, 2026

Perekonomian Kabupaten Bantul pada tahun 2025 tumbuh sebesar 4,92 persen, sedikit melambat dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 5,04 persen. Perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh menurunnya kinerja sektor konstruksi yang mengalami kontraksi sebesar

4,17 persen setelah selesainya pembangunan Jembatan Kabanaran, yang sebelumnya menjadi salah satu penggerak utama aktivitas ekonomi daerah. Pada tahun 2024, proyek tersebut memberikan dampak ekonomi yang luas melalui peningkatan aktivitas konstruksi serta mendorong sektor terkait seperti perdagangan, transportasi, dan penyediaan akomodasi serta makan minum akibat meningkatnya mobilitas tenaga kerja dan distribusi material.

Pada tahun 2025, belum terdapat proyek infrastruktur berskala besar yang memberikan dampak ekonomi setara, sehingga kontribusi sektor konstruksi terhadap pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Namun, kondisi tersebut tidak menyebabkan perlambatan ekonomi secara keseluruhan karena perekonomian Kabupaten Bantul tetap ditopang oleh sektor perdagangan, pertanian, pariwisata, dan UMKM yang menunjukkan kinerja relatif stabil.

Pada Triwulan I tahun 2026 perekonomian Kabupaten Bantul tumbuh sebesar 5,47 persen (y-on-y) dibandingkan dengan Triwulan I tahun 2025. Namun, jika dibandingkan dengan Triwulan IV tahun 2025, perekonomian Kabupaten Bantul pada Triwulan I tahun 2026 mengalami kontraksi sebesar 1,16 persen (q-to-q). Kondisi ini menunjukkan bahwa secara tahunan kinerja ekonomi Kabupaten Bantul masih mengalami pertumbuhan positif, meskipun terjadi penurunan aktivitas ekonomi secara musiman pada awal tahun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul pada Triwulan I tahun 2026 turut dipengaruhi oleh momentum bulan Ramadhan yang berlangsung pada periode tersebut. Peningkatan aktivitas masyarakat selama bulan puasa, terutama melalui kenaikan konsumsi rumah tangga, aktivitas perdagangan, serta permintaan terhadap penyediaan makanan dan minuman, memberikan dorongan terhadap pergerakan ekonomi daerah. Dampak momentum tersebut terlihat dari kinerja sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang mencatat pertumbuhan tertinggi pada Triwulan I tahun 2026, yaitu sebesar 10,16 persen.

Berdasarkan lapangan usaha, sebagian besar sektor ekonomi Kabupaten Bantul pada Triwulan I tahun 2026 menunjukkan kinerja yang positif. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi, sedangkan sektor Jasa Keuangan dan

Asuransi mencatat pertumbuhan terendah dengan kontraksi sebesar 1,84 persen. Dari sisi struktur ekonomi, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Bantul pada Triwulan I tahun 2026, yaitu sebesar 15,27 persen, diikuti oleh Industri Pengolahan sebesar 14,40 persen dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 13,67 persen.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Bantul pada Triwulan I tahun 2026 masih ditopang oleh sektor pertanian, industri pengolahan, serta sektor berbasis pariwisata dan konsumsi masyarakat. Peran sektor-sektor tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di tengah dinamika perubahan aktivitas ekonomi antar periode.

2.1.3.2 Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan menunjukkan persentase jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan jumlah penduduk di suatu daerah.

Tabel 2.2 Capaian Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul
Tahun 2021-2025 dan Target Tahun 2026

Uraian	Satuan	Capaian					Target RKPD	Target Perubahan RKPD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
Tingkat Kemiskinan	Persen	14,04	12,27	11,96	11,66	11,54	9,39-9,67	9,39-9,67

Sumber: P RKPD Kabupaten Bantul, 2026

Pada tahun 2025, tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul mengalami penurunan menjadi 11,54 persen, atau berkurang sebesar 0,12 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Penurunan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah daerah.

Upaya penanganan kemiskinan dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu pengurangan beban masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat, penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Pengurangan beban dilakukan dengan pemberian bantuan diantaranya melalui program boga sehat dan program sambung pangan bantul bagi kelompok masyarakat miskin absolut, khususnya lanjut usia dan penyandang disabilitas, sebagai bentuk dukungan pemenuhan kebutuhan

dasar. Sementara itu, upaya pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan kapasitas Masyarakat miskin, salah satunya melalui pelaksanaan pelatihan keterampilan untuk mendorong kemandirian ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin. Sedangkan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan dilakukan melalui penyediaan infrastruktur dasar seperti penyediaan air minum dan sanitasi layak, pembangunan jalan / akses transportasi, serta penataan kawasan kumuh.

Berbagai upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menurunkan angka kemiskinan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat Kabupaten Bantul secara berkelanjutan.

2.1.3.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang menggambarkan tingkat pembangunan manusia. IPM diukur dengan pendekatan tiga dimensi yaitu kesehatan, pengetahuan dan dimensi hidup layak.

Tabel 2.3 Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul Tahun 2021-2025 dan Target Tahun 2026

Uraian	Satuan	Capaian					Target RKPD	Target Perubahan RKPD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	80,63	81,04	81,74	82,05	83,03	82,26-82,89	83,21

Sumber: P RKPD Kabupaten Bantul, 2025

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bantul menunjukkan tren peningkatan selama periode 2021–2025. Nilai IPM meningkat dari 80,63 pada tahun 2021 menjadi 83,03 pada tahun 2025. Peningkatan tersebut mencerminkan adanya perbaikan kualitas pembangunan manusia yang ditandai dengan meningkatnya capaian pada aspek dasar pembentuk IPM, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

Peningkatan pembangunan manusia berjalan seiring dengan perkembangan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Perbaikan tingkat kesejahteraan, yang tercermin dari peningkatan kemampuan pengeluaran masyarakat, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, serta perbaikan derajat kesehatan, turut berkontribusi terhadap peningkatan nilai IPM Kabupaten Bantul. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan

ekonomi yang diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Bantul menetapkan target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 sebesar 82,26–82,89. Selanjutnya, melalui perubahan RKPD tahun 2026, target IPM disesuaikan menjadi 83,21. Penyesuaian target tersebut didasarkan pada hasil proyeksi menggunakan model tren linier dengan memanfaatkan data historis IPM selama 15 tahun terakhir.

Hasil proyeksi menunjukkan adanya peluang peningkatan capaian IPM yang sejalan dengan tren perbaikan pembangunan manusia di Kabupaten Bantul. Peningkatan sasaran tersebut mencerminkan optimisme pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan dasar, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, serta peningkatan standar hidup masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung keberlanjutan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul.

2.1.3.4 Rasio Gini

Besarnya ketimpangan pendapatan masyarakat di suatu wilayah dapat dilihat dengan besarnya nilai Indeks Gini (Koefisien Gini). Nilai Indeks Gini berkisar dari angka nol sampai dengan 1 ($0 \leq \text{Indeks Gini} \leq 1$). Semakin mendekati angka 1 maka dapat dikatakan bahwa ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut semakin besar.

Tabel 2.4 Capaian Rasio Gini Kabupaten Bantul Tahun 2021-2025 dan Target Tahun 2026

Uraian	Satuan	Capaian					Target RKPD	Target Perubahan RKPD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
Rasio Gini	Indeks	0,441	0,410	0,454	0,417	0,427	0,385-0,409	0,385-0,409

Sumber: P RKPD Kabupaten Bantul, 2026

Rasio Gini Kabupaten Bantul dalam lima tahun terakhir berada pada kategori kesenjangan sedang, dengan nilai berkisar antara 0,4 hingga 0,5. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi pendapatan masyarakat masih menghadapi tantangan dalam pemerataan, meskipun tingkat

ketimpangan belum berada pada kategori tinggi. Pada tahun 2025, Rasio Gini Kabupaten Bantul tercatat sebesar 0,427, meningkat sebesar 0,010 poin dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 0,417.

Peningkatan Rasio Gini tersebut menunjukkan adanya kenaikan tingkat ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat dibandingkan tahun sebelumnya. Perubahan ini dapat dipengaruhi oleh perbedaan kemampuan pemulihan dan peningkatan pendapatan antar kelompok masyarakat, terutama antara kelompok berpendapatan rendah dengan kelompok masyarakat berpendapatan lebih tinggi. Meskipun demikian, capaian tersebut masih berada dalam rentang kategori kesenjangan sedang, sehingga diperlukan penguatan kebijakan pemerataan ekonomi untuk menjaga agar peningkatan ketimpangan tidak berlanjut.

2.1.3.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Ada dua jenis pengangguran yaitu pengangguran terbuka (*open unemployment*) dan setengah pengangguran (*disguised unemployment*). Pengangguran Terbuka adalah orang yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha. Setengah pengangguran adalah orang yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan).

Tabel 2.5 Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul
Tahun 2021-2025 dan Target Tahun 2026

Uraian	Satuan	Capaian					Target RKPD	Target Perubahan RKPD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,04	3,97	3,78	3,62	3,57	3,04-3,57	3,04-3,56

Sumber: P RKPD Kabupaten Bantul, 2026

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bantul mengalami penurunan dari 3,62 persen pada tahun 2024 menjadi 3,57 persen pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan penyerapan tenaga kerja seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi daerah. Namun, tantangan ketenagakerjaan masih perlu menjadi perhatian, terutama dalam peningkatan kualitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja yang produktif.

Upaya pengurangan pengangguran dilakukan melalui berbagai program, antara lain peningkatan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, transmigrasi umum, perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan, peningkatan kualitas serta produktivitas tenaga kerja. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi tenaga kerja, meningkatkan daya saing, dan mendorong terciptanya kesempatan kerja yang lebih luas dan berkelanjutan.

Target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 disesuaikan menjadi 3,04–3,56 persen. Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan capaian kinerja Tahun 2025, di mana TPT Kabupaten Bantul telah mencapai batas atas target yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026. Dengan mempertimbangkan realisasi tersebut, penyesuaian target diperlukan agar lebih mencerminkan kondisi terkini, menjaga relevansi indikator kinerja, serta memastikan target yang ditetapkan tetap realistis, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah serta dinamika ketenagakerjaan yang berkembang.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah dan strategi kebijakan makro fiskal tahun 2026 didesain untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rangka mendorong akselerasi tersebut, kebijakan fiskal 2026 didorong agar tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui (i) optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha; (ii) penguatan kualitas belanja negara yang efisien, fokus terhadap program prioritas untuk akselerasi pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan, serta berorientasi pada output/outcome (*spending better*); dan (iii) mendorong pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan.

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2026 berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD yang merupakan siklus pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran dan keserasian antar dokumen, maka terkait dengan pengelolaan keuangan berupa struktur APBD, nomenklatur program dan kegiatan serta kode rekening yang disajikan dokumen RKPD,

KUA PPAS, dan RAPBD akan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Struktur Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan berpedoman dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026. Berdasarkan hasil realisasi dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, maka dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain mengacu arah dan strategi kebijakan makro fiskal tahun 2026 juga untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah dan untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, peningkatan produktivitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi.

Perubahan KUA dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan berkenaan; dan/atau
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026, kebijakan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bantul mengacu pada beberapa peraturan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- 2) Surat Edaran Gubernur DIY Nomor B/900.1/5/B2 Tahun 2026 tentang Penganggaran Perubahan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY Tahun Anggaran 2026.

- 3) Surat Edaran Gubernur DIY Nomor B/900.1/6/B2 Tahun 2026 tentang Penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY Tahun Anggaran 2026.
- 4) Penggunaan Dana Tidak Terduga untuk pemenuhan kebutuhan mendesak dan pemenuhan usulan revisi DPA dari Perangkat Daerah.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

Dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2026, asumsi dasar yang digunakan antara lain meliputi asumsi dasar yang digunakan dalam APBN meliputi laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Rasio Gini, dan Tingkat Pengangguran Terbuka, yang merupakan indikator makro perekonomian Kabupaten Bantul. Beberapa indikator utama ekonomi makro pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 diantaranya:

Tabel 3.1.
Indikator Ekonomi Makro di Indonesia

No	Indikator Ekonomi Makro	Asumsi Tahun 2026
1.	Laju Pertumbuhan ekonomi	5,2 - 5,8 %
2.	Tingkat kemiskinan	6,5 – 7,5 %
3.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	0,57
4.	Indeks Gini	0,377 – 0,380
5.	Tingkat pengangguran terbuka	4,44 – 4,96 %

Sumber: Bappeda Bantul, 2026

Perang di Timur Tengah memperburuk kondisi dan prospek perekonomian global. Serangan Israel dan AS ke Iran yang diikuti dengan serangan pembalasan Iran sejak akhir Februari 2026 makin menekan prospek pertumbuhan global. Melonjaknya harga minyak dan komoditas dunia berdampak negatif terhadap rantai pasok perdagangan antarnegara sehingga menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi dunia dan meningkatkan tekanan inflasi global. Pertumbuhan ekonomi dunia pada 2026 diperkirakan lebih lambat menjadi 3,1% dari prakiraan sebelumnya sebesar 3,2%, meskipun terjadi penurunan tarif resiprokal AS. Tekanan inflasi global meningkat dari 3,8% menjadi 4,1%, sehingga mempersempit ruang penurunan kebijakan moneter global, termasuk makin tertundanya penurunan *Fed Funds Rate* (FFR). *Yield US Treasury* terus meningkat akibat membengkaknya defisit fiskal AS.

Di tengah tingginya ketidakpastian global dan beratnya tantangan perekonomian domestik akibat eskalasi konflik di Timur Tengah, perekonomian Indonesia pada triwulan I 2026 tetap menunjukkan ketahanan yang baik dan perlu terus diperkuat agar mampu tumbuh lebih tinggi secara berkelanjutan. Ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 5,61% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,39% (yoy), ditopang oleh kuatnya permintaan domestik, termasuk konsumsi rumah tangga pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1447 H, stimulus Pemerintah, dan peningkatan investasi. Kinerja eksternal tetap terjaga dengan surplus neraca perdagangan barang pada triwulan I 2026 sebesar 5,5 miliar dolar AS ditopang oleh surplus perdagangan nonmigas di tengah defisit neraca perdagangan migas, sementara aliran modal asing tercatat net outflow sebesar 0,8 miliar dolar AS akibat tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Posisi cadangan devisa pada akhir Maret 2026 tetap tinggi sebesar 148,2 miliar dolar AS. Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS pada akhir Maret 2026 melemah 1,88% (ptp) dibandingkan level akhir Desember 2025 dipengaruhi penguatan dolar AS dan keluarnya aliran modal asing dari emerging markets. (Bank Indonesia, *Laporan Kelembagaan Bank Indonesia Triwulan I - 2026*).

Berdasarkan Bank Indonesia (2026) Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan I 2026 tetap menunjukkan ketahanan di tengah perlambatan ekonomi global dan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan internasional. Defisit transaksi berjalan tetap berada pada level rendah, sementara transaksi modal dan finansial masih mencatat defisit yang terkendali. Secara keseluruhan, NPI pada triwulan I 2026 mencatat defisit sebesar 9,1 miliar dolar AS. Meskipun demikian, posisi cadangan devisa Indonesia tetap kuat pada akhir Maret 2026 sebesar 148,2 miliar dolar AS, yang mampu membiayai sekitar 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional.

Di tengah dinamika geopolitik dan meningkatnya ketidakpastian pasar global yang mendorong penguatan dolar AS, nilai tukar Rupiah tetap menghadapi tekanan. Pada triwulan II 2026, Rupiah mengalami pelemahan dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2025. Nilai tukar Rupiah bergerak dari sekitar Rp16.670 per dolar AS pada akhir 2025 menjadi sekitar

Rp18.173 per dolar AS pada Juni 2026, seiring meningkatnya tekanan di pasar keuangan global dan penguatan dolar AS.

Pada Juni 2026, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat sebesar 3,34% (year-on-year/yoy), dengan nilai IHK sebesar 111,89. Inflasi tersebut dipengaruhi oleh peningkatan harga pada seluruh kelompok pengeluaran. Beberapa kelompok yang mengalami kenaikan harga antara lain kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,67%; kelompok transportasi sebesar 4,57%; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mencatat kenaikan tertinggi sebesar 10,10%. Selain itu, kenaikan harga juga terjadi pada kelompok pengeluaran lainnya, meliputi pakaian dan alas kaki, perumahan, perlengkapan rumah tangga, kesehatan, informasi dan komunikasi, rekreasi, pendidikan, serta penyediaan makanan dan minuman/restoran. (Badan Pusat Statistik (BPS), Perkembangan Indeks Harga Konsumen Juni 2026).

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Kerangka ekonomi makro tahun 2026 disusun berdasarkan kondisi perekonomian Kabupaten Bantul pada tahun 2025 dan triwulan I tahun 2026, masalah-masalah yang harus diselesaikan, tantangan yang harus dihadapi, serta tujuan yang ingin dicapai pada tahun mendatang untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan. Kerangka ekonomi makro meliputi laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia, rasio gini, dan tingkat pengangguran terbuka.

Penyandingan Target Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Penyandingan Target Indikator Ekonomi Makro Tahun 2026

No	Indikator Ekonomi Makro	KUA 2026	APBD 2026	Perubahan RKPD dan KUA 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,28-5,51	5,28-5,51	5,28-5,51
2	Tingkat Kemiskinan	9,39-9,67	9,39-9,67	9,39-9,67
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	82,26-82,89	82,26-82,89	83,21
4	Rasio Gini	0,385-0,409	0,385-0,409	0,385-0,409
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,04-3,57	3,04-3,57	3,04-3,56

Sumber: Bappeda Bantul, 2026

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target indikator ekonomi makro pada Perubahan RKPD dan Perubahan KUA Tahun 2026 yang disesuaikan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Bantul pada tahun 2025 tumbuh sebesar 4,92 persen, sedikit melambat dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 5,04 persen. Perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh menurunnya kinerja sektor konstruksi yang mengalami kontraksi sebesar 4,17 persen setelah selesainya pembangunan Jembatan Kabanaran, yang sebelumnya menjadi salah satu penggerak utama aktivitas ekonomi daerah. Pada tahun 2024, proyek tersebut memberikan dampak ekonomi yang luas melalui peningkatan aktivitas konstruksi serta mendorong sektor terkait seperti perdagangan, transportasi, dan penyediaan akomodasi serta makan minum akibat meningkatnya mobilitas tenaga kerja dan distribusi material.

Pada tahun 2025, belum terdapat proyek infrastruktur berskala besar yang memberikan dampak ekonomi setara, sehingga kontribusi sektor konstruksi terhadap pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Namun, kondisi tersebut tidak menyebabkan perlambatan ekonomi secara keseluruhan karena perekonomian Kabupaten Bantul tetap ditopang oleh sektor perdagangan, pertanian, pariwisata, dan UMKM yang menunjukkan kinerja relatif stabil.

Pada Triwulan I tahun 2026 perekonomian Kabupaten Bantul tumbuh sebesar 5,47 persen (y-on-y) dibandingkan dengan Triwulan I tahun 2025. Namun, jika dibandingkan dengan Triwulan IV tahun 2025, perekonomian Kabupaten Bantul pada Triwulan I tahun 2026 mengalami kontraksi sebesar 1,16 persen (q-to-q). Kondisi ini menunjukkan bahwa secara tahunan kinerja ekonomi Kabupaten Bantul masih mengalami pertumbuhan positif, meskipun terjadi penurunan aktivitas ekonomi secara musiman pada awal tahun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul pada Triwulan I tahun 2026 turut dipengaruhi oleh momentum bulan Ramadhan yang berlangsung pada periode tersebut. Peningkatan aktivitas masyarakat selama bulan puasa, terutama melalui kenaikan konsumsi rumah tangga, aktivitas perdagangan, serta permintaan terhadap penyediaan makanan

dan minuman, memberikan dorongan terhadap pergerakan ekonomi daerah. Dampak momentum tersebut terlihat dari kinerja sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang mencatat pertumbuhan tertinggi pada Triwulan I tahun 2026, yaitu sebesar 10,16 persen.

Berdasarkan lapangan usaha, sebagian besar sektor ekonomi Kabupaten Bantul pada Triwulan I tahun 2026 menunjukkan kinerja yang positif. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi, sedangkan sektor Jasa Keuangan dan Asuransi mencatat pertumbuhan terendah dengan kontraksi sebesar 1,84 persen. Dari sisi struktur ekonomi, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Bantul pada Triwulan I tahun 2026, yaitu sebesar 15,27 persen, diikuti oleh Industri Pengolahan sebesar 14,40 persen dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 13,67 persen.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Bantul pada Triwulan I tahun 2026 masih ditopang oleh sektor pertanian, industri pengolahan, serta sektor berbasis pariwisata dan konsumsi masyarakat. Peran sektor-sektor tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di tengah dinamika perubahan aktivitas ekonomi antar periode.

3.2.2 Kemiskinan

Pada tahun 2025, tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul mengalami penurunan menjadi 11,54 persen, atau berkurang sebesar 0,12 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Penurunan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah daerah.

Upaya penanganan kemiskinan dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu pengurangan beban masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat, penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Pengurangan beban dilakukan dengan pemberian bantuan diantaranya melalui program boga sehat dan program sambung pangan bantul bagi kelompok masyarakat miskin absolut, khususnya lanjut usia dan penyandang disabilitas, sebagai bentuk dukungan pemenuhan kebutuhan dasar. Sementara itu, upaya pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan kapasitas Masyarakat miskin, salah satunya melalui pelaksanaan

pelatihan keterampilan untuk mendorong kemandirian ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin. Sedangkan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan dilakukan melalui penyediaan infrastruktur dasar seperti penyediaan air minum dan sanitasi layak, pembangunan jalan / akses transportasi, serta penataan kawasan kumuh.

Berbagai upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menurunkan angka kemiskinan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat Kabupaten Bantul secara berkelanjutan.

3.2.3 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bantul menunjukkan tren peningkatan selama periode 2021–2025. Nilai IPM meningkat dari 80,63 pada tahun 2021 menjadi 83,03 pada tahun 2025. Peningkatan tersebut mencerminkan adanya perbaikan kualitas pembangunan manusia yang ditandai dengan meningkatnya capaian pada aspek dasar pembentuk IPM, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

Peningkatan pembangunan manusia berjalan seiring dengan perkembangan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Perbaikan tingkat kesejahteraan, yang tercermin dari peningkatan kemampuan pengeluaran masyarakat, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, serta perbaikan derajat kesehatan, turut berkontribusi terhadap peningkatan nilai IPM Kabupaten Bantul. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Bantul menetapkan target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 sebesar 82,26–82,89. Selanjutnya, melalui perubahan RKPD tahun 2026, target IPM disesuaikan menjadi 83,21. Penyesuaian target tersebut didasarkan pada hasil proyeksi menggunakan model tren linier dengan memanfaatkan data historis IPM selama 15 tahun terakhir.

Hasil proyeksi menunjukkan adanya peluang peningkatan capaian IPM yang sejalan dengan tren perbaikan pembangunan manusia di Kabupaten Bantul. Peningkatan sasaran tersebut mencerminkan optimisme pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan dasar, terutama pada

sektor pendidikan, kesehatan, serta peningkatan standar hidup masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung keberlanjutan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul.

3.2.4 Rasio Gini

Rasio Gini Kabupaten Bantul dalam lima tahun terakhir berada pada kategori kesenjangan sedang, dengan nilai berkisar antara 0,4 hingga 0,5. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi pendapatan masyarakat masih menghadapi tantangan dalam pemerataan, meskipun tingkat ketimpangan belum berada pada kategori tinggi. Pada tahun 2025, Rasio Gini Kabupaten Bantul tercatat sebesar 0,427, meningkat sebesar 0,010 poin dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 0,417.

Peningkatan Rasio Gini tersebut menunjukkan adanya kenaikan tingkat ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat dibandingkan tahun sebelumnya. Perubahan ini dapat dipengaruhi oleh perbedaan kemampuan pemulihan dan peningkatan pendapatan antar kelompok masyarakat, terutama antara kelompok berpendapatan rendah dengan kelompok masyarakat berpendapatan lebih tinggi. Meskipun demikian, capaian tersebut masih berada dalam rentang kategori kesenjangan sedang, sehingga diperlukan penguatan kebijakan pemerataan ekonomi untuk menjaga agar peningkatan ketimpangan tidak berlanjut.

3.2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bantul mengalami penurunan dari 3,62 persen pada tahun 2024 menjadi 3,57 persen pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan penyerapan tenaga kerja seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi daerah. Namun, tantangan ketenagakerjaan masih perlu menjadi perhatian, terutama dalam peningkatan kualitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja yang produktif.

Upaya pengurangan pengangguran dilakukan melalui berbagai program, antara lain peningkatan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, transmigrasi umum, perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan, peningkatan kualitas serta produktivitas tenaga kerja. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi tenaga kerja,

meningkatkan daya saing, dan mendorong terciptanya kesempatan kerja yang lebih luas dan berkelanjutan.

Target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 disesuaikan menjadi 3,04–3,56 persen. Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan capaian kinerja Tahun 2025, di mana TPT Kabupaten Bantul telah mencapai batas atas target yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026. Dengan mempertimbangkan realisasi tersebut, penyesuaian target diperlukan agar lebih mencerminkan kondisi terkini, menjaga relevansi indikator kinerja, serta memastikan target yang ditetapkan tetap realistis, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah serta dinamika ketenagakerjaan yang berkembang.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2026

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur APBD, karena besaran pendapatan daerah sangat menentukan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur APBD, karena besaran pendapatan daerah sangat menentukan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berdasarkan sumber, pendapatan daerah dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah Merupakan Penerimaan Yang Diperoleh Dari Sektor Yaitu Sebagai Berikut:
 - a. Pajak daerah, terdiri dari PBB Perkotaan dan Perdesaan, BPHTB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Sarang Burung Walet;
 - b. Retribusi daerah, terdiri retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu dan retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing.
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah.
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, pendapatan denda retribusi, tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan jasa dana bergulir dan penerimaan lain-lain.

2. Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya, meliputi Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Pendapatan transfer terdiri atas:
- a. Transfer Pemerintah Pusat
 - 1) Dana Perimbangan
 - a) Dana Transfer Umum
 - (1) Bagi hasil pajak/bukan pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil dari sebagian penerimaan perpajakan dan bukan perpajakan.
 - a. Bagi Hasil Pajak, berupa :
 - Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan
 - Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi
 - Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
 - b. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, berupa:
 - Bagi Hasil Dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan
 - Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan
 - (2) Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah;
 - b) Dana Transfer Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu bertujuan membantu mendanai kegiatan-kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 - 2) Dana Insentif Daerah;
 - 3) Dana Otonomi Khusus;
 - 4) Dana Keistimewaan;
 - 5) Dana Desa.

- b. Transfer Antar-Daerah
 - 1) Bagi hasil pajak dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya; dan
 - 2) Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari sebagai berikut:
 - a. Pendapatan hibah meliputi pendapatan hibah dari pemerintah dan pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri;
 - b. Dana Darurat;
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi dan rencana proyeksi pendapatan, terjadi kenaikan pendapatan daerah sebesar Rp28.475.255.809,00 semula pada APBD Tahun 2026 sebesar Rp2.311.219.955.330,00 menjadi Rp2.339.695.211.139,00.

- 1) Komponen Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:
 - Pajak Daerah tetap sebesar Rp408.211.152.680,00
 - Retribusi Daerah tetap sebesar Rp251.312.134.106,00
 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tetap sebesar Rp20.199.694.868,00
 - Lain-lain PAD yang Sah naik sebesar Rp1.892.743.010,00 menjadi Rp75.519.089.276,00 karena adanya perubahan target pendapatan BLUD.
- 2) Komponen Pendapatan Transfer terdiri dari:
 - Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat naik sebesar Rp25.530.514.756,00 menjadi Rp1.405.655.795.756,00 karena penyesuaian transfer ke daerah tahun 2026 yaitu penyesuaian DAU yang ditentukan penggunaannya dan pengurangan DAK Non Fisik – BOK.
 - Pendapatan Transfer Antar Daerah naik sebesar Rp1.051.998.043,00 menjadi Rp178.797.344.453,00 karena penyesuaian anggaran Dana Keistimewaan sesuai dengan berita acara, penyesuaian Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dan penyesuaian anggaran Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Perubahan kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 dikarenakan:

- 1) Penyesuaian target pendapatan pajak, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah.
- 2) Penyesuaian target pendapatan dengan regulasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 3) Pengembangan efisiensi dan transparansi;
- 4) Peningkatan mutu pelayanan publik kepada wajib pajak/ retribusi daerah dengan memberikan kecepatan/kemudahan dalam pelayanan pembayaran pajak, akses informasi dan kemudahan dalam pengurusan pajak;
- 5) Pengembangan konsep pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi melalui penyederhanaan sistem dan prosedur serta memberikan banyak alternatif model layanan pembayaran kepada masyarakat;
- 6) Optimalisasi PAD untuk membangun kemandirian keuangan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan penyesuaian target Retribusi Daerah;
- 7) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penerimaan pendapatan transfer dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah.

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Secara keseluruhan, pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diperkirakan naik sebesar Rp28.475.255.809,00 semula pada APBD Tahun 2026 sebesar Rp2.311.219.955.330,00 menjadi Rp2.339.695.211.139,00 atau sebesar 1,23%.

Adapun hasil analisis dan proyeksi sumber-sumber perubahan pendapatan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 tercantum dalam Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Realisasi Pendapatan Tahun 2022 s.d 2025, Pendapatan APBD Tahun 2026, Realisasi Pendapatan Semester I Tahun 2026, dan Proyeksi/Target Perubahan Pendapatan Tahun 2026 di Kabupaten Bantul

No	Uraian	Jumlah (Rp)						
		Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	APBD Tahun 2026	Realisasi TA. 2026 Semester I	Proyeksi/Target Perubahan KUA Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	540.572.423.372,80	587.435.038.672,92	638.567.864.259,57	766.131.199.608,89	753.349.327.920,00	382.778.045.190,51	755.242.070.930,00
4.1.01	Pajak Daerah	252.857.438.493,70	269.918.537.186,00	295.769.695.358,90	414.970.629.456,50	408.211.152.680,00	205.617.010.059,00	408.211.152.680,00
4.1.02	Retribusi Daerah	42.178.624.886,07	42.382.506.560,80	307.622.088.520,00	312.457.635.841,00	251.312.134.106,00	115.867.705.392,00	251.312.134.106,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.839.915.416,20	20.515.070.732,29	20.083.794.982,30	20.838.377.004,15	20.199.694.868,00	21.245.870.925,00	20.199.694.868,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	224.696.444.576,83	254.618.924.193,83	15.092.285.398,37	17.864.557.307,24	73.626.346.266,00	40.047.458.814,51	75.519.089.276,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.712.037.734.603,00	1.821.467.142.818,65	1.968.055.104.226,00	1.746.164.380.877,00	1.557.870.627.410,00	787.533.357.922,00	1.584.453.140.209,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.469.251.642.781,00	1.541.171.838.737,00	1.678.657.691.985,00	1.590.136.561.180,00	1.380.125.281.000,00	727.123.951.863,00	1.405.655.795.756,00
	Dana Perimbangan	1.309.437.261.781,00	1.355.883.247.737,00	1.500.030.298.985,00	1.447.496.790.096,00	1.277.434.882.000,00	699.403.133.863,00	
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	36.764.154.907,00	34.766.685.062,00	35.169.801.000,00	32.006.870.000,00	12.747.285.000,00	5.000.112.950,00	12.747.285.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	902.030.732.566,00	954.626.878.777,00	1.022.019.834.045,00	1.036.581.653.691,00	914.464.154.000,00	530.121.792.000,00	940.333.075.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	370.642.374.308,00	366.489.683.898,00	442.840.663.940,00	378.908.266.405,00	350.223.443.000,00	164.281.228.913,00	349.885.036.756,00
4.2.01.06	Dana Insentif Daerah (DID)/Insentif Fiskal	58.566.684.000,00	58.809.566.000,00	51.233.491.000,00	22.624.496.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.05	Dana Desa	101.247.697.000,00	126.479.025.000,00	127.393.902.000,00	120.015.275.084,00	102.690.399.000,00	27.720.818.000,00	102.690.399.000,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)						
		Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	APBD Tahun 2026	Realisasi TA. 2026 Semester I	Proyeksi/Target Perubahan KUA Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	242.786.091.822,00	280.295.304.081,65	289.397.412.241,00	156.027.819.697,00	177.745.346.410,00	60.409.406.059,00	178.797.344.453,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	192.023.344.227,00	201.588.461.475,00	200.933.285.798,00	124.738.816.027,00	108.340.869.652,00	30.920.043.569,00	111.871.983.501,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	50.762.747.595,00	78.706.842.606,65	88.464.126.443,00	31.289.003.670,00	69.404.476.758,00	29.489.362.490,00	66.925.360.952,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.967.281.219,74	7.182.235.863,00	2.790.385.919,00	341.262.977,00		154.303.502,00	
4.3.01	Pendapatan Hibah	6.725.000.000,00	7.164.398.619,00	2.790.385.919,00	341.262.977,00		154.303.502,00	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	22.148.900,00	17.837.244,00					
4.3.04	Pendapatan yang tidak bisa dikelompokkan	1.220.132.319,74						
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.260.577.439.195,54	2.416.084.417.354,57	2.609.413.354.404,57	2.512.636.843.462,89	2.311.219.955.330,00	1.170.465.706.614,51	2.339.695.211.139,00

Sumber: BPKPAD Bantul, 2026

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Kebijakan penganggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diarahkan sesuai dengan prioritas pembangunan dan perubahan perencanaan belanja daerah Tahun 2026 dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, sehingga belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Belanja Kabupaten Bantul mengalami peningkatan sebesar Rp50.281.238.049,61 yaitu pada APBD 2026 sebesar Rp2.443.557.413.968,89 menjadi Rp2.493.838.652.018,50.

Sehingga dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan 30 Juni 2026 (Triwulan II) ada beberapa penyesuaian belanja yang antara lain digunakan untuk:

- 1) Penyesuaian belanja BLUD karena adanya kenaikan target pendapatan tahun 2026 dan SILPA tahun 2025;
- 2) Penyesuaian honor PPPK Paruh Waktu;
- 3) Penggunaan sisa DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru;
- 4) Penyesuaian Bantuan Operasional Sekolah Nasional;
- 5) Biaya appraisal dan sewa tanah Stadion Sultan Agung;
- 6) Peningkatan kemantapan jalan kabupaten;
- 7) Penyusunan DED Pasar Rakyat (Pasar Mangiran, Pasar Bantul dan Pasar Piyungan);
- 8) Pemeliharaan destinasi wisata Goa Selarong;
- 9) Sarana dan prasarana retribusi Kawasan Pantai Selatan;
- 10) Pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan (*Universal Coverage Jamsostek*);
- 11) Pengumpulan data sosial dan ekonomi di tingkat desa/kelurahan melalui program Sipedet Cantik;
- 12) Kegiatan keagamaan dan perayaan hari besar keagamaan;
- 13) Kompensasi Dampak Negatif (KDN) TPST Argodadi;
- 14) Pemeliharaan Bangunan/Gedung Kantor;

-
- 15) Pengadaan sarana prasarana kantor (*laptop, printer, scanner, dll*);
 - 16) Penyesuaian Belanja Bantuan Keuangan (Sharing Kontribusi Pengelolaan IPAL Sewon);
 - 17) Penyesuaian Belanja Tidak Terduga.

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga

Secara keseluruhan, belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diperkirakan meningkat sebesar Rp50.281.238.049,61 yaitu pada APBD 2026 sebesar Rp2.443.557.413.968,89 menjadi Rp2.493.838.652.018,50 atau sebesar 2,06%.

Adapun target perubahan belanja daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 tercantum dalam Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1 Realisasi Belanja Tahun 2022 s.d 2025, Belanja APBD Tahun 2026, Realisasi Belanja Semester I Tahun 2026, dan Proyeksi/Target Perubahan Belanja Tahun 2026 di Kabupaten Bantul

No	Uraian	Jumlah (Rp)						
		Realisasi TA. 2022	Realisasi TA. 2023	Realisasi TA. 2024	Realisasi TA. 2025	APBD Tahun 2026	Realisasi TA. 2026 Semester I	Proyeksi/Target Perubahan KUA Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.1	Belanja Operasi	1.721.577.286.930,32	1.840.327.289.726,91	1.972.500.878.943,82	1.953.712.205.582,04	1.964.789.992.422,29	936.805.612.805,74	2.013.579.349.379,57
5.1.01	Belanja Pegawai	853.342.373.348,00	860.578.542.728,00	952.731.205.875,00	1.001.021.783.465,00	1.002.139.576.313,04	531.022.824.351,00	1.013.920.765.355,04
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	768.495.409.619,24	858.885.766.998,91	886.056.158.351,82	856.399.680.925,04	869.798.749.699,25	357.911.022.879,74	906.782.067.614,53
5.1.05	Belanja Hibah	91.629.103.963,08	115.915.380.000,00	128.922.914.717,00	91.182.341.192,00	88.181.866.410,00	46.186.165.575,00	88.321.716.410,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.110.400.000,00	4.947.600.000,00	4.790.600.000,00	5.108.400.000,00	4.669.800.000,00	1.685.600.000,00	4.554.800.000,00
5.2	Belanja Modal	221.698.419.757,81	227.673.894.188,81	279.968.387.225,89	195.412.733.322,80	160.425.656.347,60	29.220.410.922,12	163.518.440.656,60
5.2.01	Belanja Modal Tanah	8.247.988.540,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.206.003.149,45	76.046.486.634,86	83.581.489.731,00	60.251.382.383,00	38.052.115.908,00	13.196.540.602,00	41.004.588.150,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.780.797.101,00	32.716.587.212,88	55.291.616.258,64	13.492.099.185,00	29.352.886.415,60	5.189.423.477,12	29.089.078.219,60
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	98.155.322.270,36	110.642.014.782,07	132.955.617.915,25	111.660.165.894,80	84.233.782.002,00	7.965.996.615,00	85.035.058.919,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.308.308.697,00	8.268.805.559,00	8.041.511.571,00	9.447.873.360,00	8.786.872.022,00	2.868.450.228,00	8.389.715.368,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	0	98.151.750,00	561.212.500,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	19.683.697.169,00	1.122.989.975,00	7.518.166.014,00	3.525.110.891,00	5.000.000.000,00	339.192.975,00	3.398.173.783,33
5.4	Belanja Transfer	309.515.184.340,00	342.301.803.637,00	356.026.220.783,00	348.629.547.270,00	313.341.765.199,00	110.813.493.171,00	313.342.688.199,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	26.103.398.250,00	30.677.039.097,00	35.620.232.553,00	40.548.857.469,00	37.271.261.169,00	16.989.031.141,00	37.271.261.169,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)						
		Realisasi TA. 2022	Realisasi TA. 2023	Realisasi TA. 2024	Realisasi TA. 2025	APBD Tahun 2026	Realisasi TA. 2026 Semester I	Proyeksi/Target Perubahan KUA Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	283.411.786.090,00	311.624.764.540,00	320.405.988.230,00	308.080.689.801,00	276.070.504.030,00	93.824.462.030,00	276.071.427.030,00
	Jumlah Belanja Daerah	2.272.474.588.197,13	2.411.425.977.527,72	2.616.013.652.966,71	2.501.279.597.065,84	2.443.557.413.968,89	1.077.178.709.873,86	2.493.838.652.018,50
	Total Surplus/(Defisit)	(11.897.149.001,59)	4.658.439.826,85	(6.600.298.562,14)	11.357.246.397,05	(132.337.458.638,89)	93.286.996.740,65	(154.143.440.879,50)

Sumber: BPKPAD, 2026

Kebijakan belanja berdasarkan perangkat daerah (PD) disajikan pada tabel 5.2 di bawah ini:

Tabel 5.2 Rekapitulasi Rencana Perubahan Anggaran pada Perangkat Daerah dalam Perubahan APBD Tahun 2026

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD 2026	PERGESERAN 5	KESEPAKATAN KUPA 2026	BERTAMBAH (BERKURANG)
		1	2	3	4=3-1
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	792.173.897.374,79	822.809.534.374,79	815.877.815.969,79	23.703.918.595,00
2	Dinas Kesehatan:				-
	Dinas Kesehatan	335.863.171.137,28	334.631.853.837,28	338.759.615.592,04	2.896.444.454,76
	RSUD Panembahan Senopati	195.236.425.306,00	195.236.425.306,00	202.265.542.659,52	7.029.117.353,52
	RSUD Saras Adyatma	15.889.655.935,00	15.889.655.935,00	17.152.465.861,00	1.262.809.926,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	148.786.680.397,72	149.648.569.397,72	152.902.219.397,72	4.115.539.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	14.939.416.376,97	14.563.277.376,97	14.987.277.376,97	47.861.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.316.310.474,50	13.866.310.474,50	14.139.310.474,50	823.000.000,00
6	Dinas Sosial	21.780.693.668,05	22.080.693.668,05	22.454.403.668,05	673.710.000,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	21.035.184.768,70	45.035.184.768,70	45.537.415.168,70	24.502.230.400,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	13.767.103.642,76	13.367.103.642,76	13.755.103.642,76	(12.000.000,00)
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	30.809.802.351,37	30.420.001.351,37	25.700.001.051,37	(5.109.801.300,00)
10	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	16.754.217.838,07	13.017.564.138,07	13.086.564.138,07	(3.667.653.700,00)
11	Dinas Lingkungan Hidup	48.656.417.618,00	48.300.950.618,00	50.521.478.062,00	1.865.060.444,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.160.467.826,66	11.160.467.826,66	12.122.151.325,66	961.683.499,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	10.628.879.942,08	10.374.654.942,08	13.440.256.692,08	2.811.376.750,00
14	Dinas Perhubungan	26.969.624.815,35	26.940.358.915,35	29.033.358.771,35	2.063.733.956,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	23.393.147.658,53	21.065.051.658,53	21.423.051.658,53	(1.970.096.000,00)

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD 2026	PERGESERAN 5	KESEPAKATAN KUPA 2026	BERTAMBAH (BERKURANG)
		1	2	3	4=3-1
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	25.406.496.692,90	24.117.537.692,90	25.012.537.692,90	(393.959.000,00)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.035.271.832,39	6.903.764.832,39	7.151.014.792,39	115.742.960,00
18	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	25.589.641.329,81	15.135.032.329,81	15.153.032.329,81	(10.436.609.000,00)
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.190.004.686,00	6.490.004.686,00	6.882.304.686,00	692.300.000,00
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	9.133.690.114,49	8.375.910.114,49	8.694.910.114,49	(438.780.000,00)
21	Dinas Pariwisata	14.370.218.777,53	12.653.254.777,53	13.864.914.777,53	(505.304.000,00)
22	SEKRETARIAT DAERAH	24.480.423.140,66	24.551.248.740,66	24.051.248.740,66	(429.174.400,00)
	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	625.301.007,00	371.971.007,00	387.971.007,00	(237.330.000,00)
	BAGIAN HUKUM	627.547.243,00	571.132.243,00	817.532.243,00	189.985.000,00
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	5.984.660.360,00	5.984.660.360,00	6.406.660.360,00	422.000.000,00
	BAGIAN PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN DAN SDA	329.320.022,00	329.320.022,00	329.320.022,00	-
	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	936.837.652,00	936.837.652,00	939.837.652,00	3.000.000,00
	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	5.973.445.862,00	6.319.147.862,00	7.201.555.862,00	1.228.110.000,00
	BAGIAN ORGANISASI	398.100.011,00	329.175.011,00	371.767.011,00	(26.333.000,00)
	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	638.292.390,00	638.292.390,00	639.292.390,00	1.000.000,00
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	51.366.181.483,93	51.466.181.483,93	51.771.283.483,93	405.102.000,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.552.682.076,88	12.152.948.076,88	12.213.948.076,88	(338.734.000,00)
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	416.672.847.538,00	412.779.670.232,00	414.395.599.283,33	(2.277.248.254,67)
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	13.029.896.379,97	12.605.865.179,97	12.606.865.179,97	(423.031.200,00)
27	Inspektorat Daerah	13.854.892.612,12	13.854.892.612,12	13.910.892.612,12	56.000.000,00
28	Kapanewon Piyungan	3.324.620.687,00	3.218.624.687,00	3.247.624.687,00	(76.996.000,00)
29	Kapanewon Dlingo	3.495.384.724,11	3.539.388.724,11	3.564.388.724,11	69.004.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD 2026	PERGESERAN 5	KESEPAKATAN KUPA 2026	BERTAMBAH (BERKURANG)
		1	2	3	4=3-1
30	Kapanewon Imogiri	3.719.360.087,07	3.663.364.087,07	3.757.364.087,07	38.004.000,00
31	Kapanewon Pandak	3.523.650.487,06	3.417.654.487,06	3.430.654.487,06	(92.996.000,00)
32	Kapanewon Bantul	3.167.867.935,96	3.361.871.935,96	3.374.871.935,96	207.004.000,00
33	Kapanewon Kretek	3.255.444.697,74	3.249.448.697,74	3.263.448.697,74	8.004.000,00
34	Kapanewon Bambanglipuro	2.925.208.883,63	3.019.212.883,63	3.027.212.883,63	102.004.000,00
35	Kapanewon Jetis	3.633.412.990,32	3.527.416.990,32	3.690.416.990,32	57.004.000,00
36	Kapanewon Kasihan	3.710.234.959,96	3.704.238.959,96	3.719.238.959,96	9.004.000,00
37	Kapanewon Pleret	3.446.717.050,32	3.390.721.050,32	3.423.721.050,32	(22.996.000,00)
38	Kapanewon Pajangan	3.075.249.377,32	3.069.253.377,32	3.084.253.377,32	9.004.000,00
39	Kapanewon Sanden	2.977.476.875,90	3.021.480.875,90	3.035.480.875,90	58.004.000,00
40	Kapanewon Sedayu	3.469.481.959,32	3.513.485.959,32	3.525.485.959,32	56.004.000,00
41	Kapanewon Sewon	3.952.848.013,17	3.846.852.013,17	3.860.852.013,17	(91.996.000,00)
42	Kapanewon Srandakan	3.370.543.710,69	3.264.547.710,69	3.278.547.710,69	(91.996.000,00)
43	Kapanewon Banguntapan	3.585.429.543,43	3.479.433.543,43	3.554.433.525,43	(30.996.018,00)
44	Kapanewon Pundong	3.492.097.968,17	3.486.101.968,17	3.649.101.968,17	157.004.000,00
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.075.535.674,21	9.075.535.674,21	9.391.034.258,21	315.498.584,00
JUMLAH TOTAL		2.443.557.413.968,89	2.471.823.139.162,89	2.493.838.652.018,50	50.281.238.049,61

Sumber: Aplikasi SIPD, 2026

Rencana perubahan anggaran secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.3 untuk Rencana pemenuhan SPM tahun 2026 berdasarkan rencana perubahan anggaran, tabel 5.4 untuk program dan kegiatan yang bersumber Dana Keistimewaan, dan tabel 5.5 Dukungan Kabupaten Bantul terhadap Prioritas Nasional.

Rencana pemenuhan SPM tahun 2026 berdasarkan rencana perubahan anggaran dalam Perubahan KUA Tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 5.3 Rekapitulasi Perubahan Anggaran SPM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL RENCANA PENERAPAN SPM								
SPM BIDANG PENDIDIKAN						126.787.977.879,00	413.235.035.390,00	454.708.209.326,00
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						126.787.977.879,00	413.235.035.390,00	454.708.209.326,00
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase capaian SPM Pendidikan	100 persen	100 Persen	92.193.324.879,00	219.103.402.230,00	220.176.553.747,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase capaian SPM Pendidikan SD	100 persen	100 persen	50.802.527.720,00	115.161.009.968,00	116.393.853.433,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	7.500.000,00	800.000,00	800.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	97 Paket	5 Paket	1.194.750.000,00	83.162.500,00	82.812.500,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	900 Peserta Didik	250 Peserta Didik	464.758.000,00	274.624.000,00	272.411.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	510 Orang	150 Orang	34.196.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	34 Satuan Pendidikan	34 Satuan Pendidikan	10.000.000,00	8.000.000,00	9.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	365 Satuan Pendidikan	399 Satuan Pendidikan	134.960.000,00	113.307.500,00	116.637.500,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	399 Orang	354 Orang	97.420.000,00	26.530.000,00	26.530.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	400 Orang	180 Orang	152.500.000,00	44.975.000,00	44.975.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	11 Dokumen	6 Dokumen	1.084.400.600,00	342.085.000,00	340.285.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.325.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	12637 Paket	15301 Paket	2.530.850.000,00	2.229.520.000,00	2.228.520.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	1 Ruang	742.097.700,00	4.000.000,00	4.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Unit	2 Unit	1.728.034.200,00	624.791.668,00	625.041.668,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	400 Orang	200 Orang	152.500.000,00	51.400.000,00	51.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	1 Ruang	607.206.200,00	73.762.500,00	70.862.500,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	75871 Peserta Didik	74556 Peserta Didik	41.851.030.020,00	111.273.201.800,00	112.509.628.265,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase capaian SPM Pendidikan SMP	100 persen	100 persen	36.635.835.836,00	72.055.913.266,00	71.857.502.498,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	148.515.800,00	145.604.676,00	94.804.676,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	2 Ruang	1.110.319.000,00	553.595.904,00	551.970.904,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	303.750.000,00	353.658.396,00	1.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Unit	4 Unit	1.097.008.460,00	697.085.660,00	694.760.660,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	1 Paket	198.600.000,00	124.800.000,00	124.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	14 Paket	8 Paket	2.740.350.000,00	1.948.525.000,00	1.944.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	24790 Peserta Didik	40241 Peserta Didik	26.312.845.436,00	64.530.290.630,00	64.647.796.158,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	705.438.000,00	568.868.000,00	660.006.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Orang	1 Orang	13.500.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	114 Satuan Pendidikan	94 Satuan Pendidikan	85.900.000,00	48.300.000,00	40.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	114 Satuan Pendidikan	114 Satuan Pendidikan	110.625.000,00	111.625.000,00	128.784.100,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	115 Orang	114 Orang	96.625.000,00	22.525.000,00	24.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	95 Dokumen	95 Dokumen	625.513.500,00	474.900.000,00	474.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	1 Komunitas	19.000.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	14.007.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	1 Ruang	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	400 Orang	180 Orang	152.500.000,00	44.975.000,00	44.975.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1 Buku	1 Buku	7.750.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	14740 Paket	2.701.725.000,00	2.407.310.000,00	2.400.705.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	188.363.640,00	1.500.000,00	1.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase capaian SPM Pendidikan PAUD	100 persen	100 persen	3.807.325.681,00	24.852.785.220,00	24.879.179.040,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	490.325.000,00	488.775.000,00	488.775.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	5 Paket	1 Paket	1.050.000,00	300.000,00	300.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1200 Peserta Didik	36000 Peserta Didik	747.219.000,00	22.887.109.720,00	22.902.549.720,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	637 Orang	260 Orang	91.805.500,00	52.756.000,00	52.306.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	600 Orang	180 Orang	176.250.000,00	44.975.000,00	44.975.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1295 Satuan Pendidikan	1295 Satuan Pendidikan	84.500.000,00	82.000.000,00	82.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1295 Satuan Pendidikan	1285 Satuan Pendidikan	326.523.308,00	291.850.000,00	297.488.820,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5 Dokumen	3 Dokumen	324.887.500,00	220.883.500,00	220.883.500,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	2 Ruang	568.075.000,00	566.575.000,00	566.575.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	300.000,00	300.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1200 Paket	1 Paket	223.700.000,00	300.000,00	300.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	1.500.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	645 Satuan Pendidikan	137 Satuan Pendidikan	224.798.500,00	215.361.000,00	221.126.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	1 Ruang	496.691.873,00	300.000,00	300.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase capaian SPM Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	100 persen	100 persen	947.635.642,00	7.033.693.776,00	7.046.018.776,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2592 Peserta Didik	3193 Peserta Didik	4.350.000,00	6.239.940.000,00	6.257.580.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	290 Orang	52 Orang	28.372.000,00	17.313.000,00	17.313.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	80 Satuan Pendidikan	80 Satuan Pendidikan	35.500.000,00	22.650.000,00	22.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	30 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	11.700.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	8 Dokumen	4 Dokumen	623.113.642,00	704.920.776,00	699.605.776,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	300 Paket	250 Paket	19.080.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit	195.500.000,00	300.000,00	300.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	14.600.000,00	14.300.000,00	14.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	1 unit	1 unit	1.050.000,00	300.000,00	300.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	14.370.000,00	14.070.000,00	14.070.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Kecukupan Guru SMP Negeri	0,71	0,71	34.594.653.000,00	194.131.633.160,00	234.500.655.579,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Indeks Kecukupan Guru SD Negeri	0,92	0,92				
		Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	92 Persen	93 Persen				
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal	8339 guru	8339 guru	34.594.653.000,00	194.131.633.160,00	234.500.655.579,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	4 Dokumen	34.076.657.000,00	193.847.497.160,00	234.215.391.815,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	1 Laporan	517.996.000,00	284.136.000,00	285.263.764,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
SPM BIDANG KESEHATAN					4.058.211.685,02	7.907.814.055,00	7.523.869.495,00	
DINAS KESEHATAN					4.058.211.685,02	7.907.814.055,00	7.523.869.495,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan	81 persen	81 persen	99.247.400.052,00	109.757.092.305,13	109.736.209.113,13	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	100 persen	100 persen	91.329.379.589,02	101.659.631.024,00	101.599.956.652,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8610 Orang	8610 Orang	337.000.000,00	1.931.116.475,00	1.617.150.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8610 Orang	8610 Orang	25.000.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7065 Orang	7065 Orang	20.000.000,00	1.442.123.000,00	1.424.998.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	41000 Orang	41000 Orang	35.000.000,00	12.590.000,00	70.090.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	120600 Orang	120600 Orang	35.000.000,00	389.475.000,00	394.275.000,00	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200000 Orang	200000 Orang	25.000.000,00	5.530.000,00	5.530.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	106000 Orang	106000 Orang	206.787.500,02	154.550.000,00	154.550.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12230 Orang	12230 Orang	39.985.000,00	17.760.900,00	35.260.900,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4152 Orang	4152 Orang	29.975.000,00	6.800.000,00	24.300.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2000 Orang	2000 Orang	175.755.080,00	536.705.080,00	488.161.720,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9960 Orang	9960 Orang	2.879.597.000,00	3.213.150.000,00	2.927.573.800,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	11037 Orang	11037 Orang	249.112.105,00	186.413.600,00	370.380.075,00	DINAS KESEHATAN
SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM					12.052.109.468,00	11.589.347.089,00	11.598.347.089,00	
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					12.052.109.468,00	11.589.347.089,00	11.598.347.089,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	100 Porsi	100 Porsi	1.606.475.000,00	2.768.363.000,00	2.768.363.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rumah tangga terlayani air minum	700 Rumah Tangga	700 Rumah Tangga	1.606.475.000,00	2.768.363.000,00	2.768.363.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	150 Orang	500 Orang	31.500.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	3 Dokumen	75.000.000,00	215.700.000,00	215.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	20 Liter/Detik	4.5 Liter/Detik	850.000,00	1.653.400.000,00	1.653.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	1 Unit	1 Unit	2.125.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	150 SR	264 SR	1.334.000.000,00	694.488.000,00	694.488.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.03.2.01.0033	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	1 Unit	1 Unit	132.000.000,00	132.000.000,00	132.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.03.2.01.0034	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Lembaga	6 Lembaga	31.000.000,00	41.500.000,00	41.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 Persen	100 Persen	10.445.634.468,00	8.820.984.089,00	8.829.984.089,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rumah tangga dengan akses air limbah	600 Rumah Tangga	600 Rumah Tangga	10.445.634.468,00	8.820.984.089,00	8.829.984.089,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.05.2.01.0018	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dioptimalisasi	1 Unit	1 Unit	325.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.05.2.01.0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	5 M³/Hari	50 M³/Hari	1.192.000.000,00	1.198.000.000,00	1.198.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.03.05.2.01.0024	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi	1 Unit	1 Unit	850.000,00	637.500,00	637.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.05.2.01.0026	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	1 Unit	1 Unit	52.500.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	120 Rumah Tangga	120 Rumah Tangga	44.451.700,00	36.654.715,00	36.654.715,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.05.2.01.0034	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	5 Desa	8 Desa	49.800.000,00	57.550.000,00	57.550.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	1 M³/Hari	1 M³/Hari	4.250.000,00	3.612.500,00	3.612.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	38.404.400,00	37.023.800,00	37.023.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Unit	2 Unit	2.250.138.368,00	1.874.280.574,00	1.883.280.574,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.05.2.01.0042	Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	230 Sambungan Rumah (SR)	170 Sambungan Rumah (SR)	3.342.240.000,00	2.340.525.000,00	2.340.525.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.03.05.2.01.0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	200 Rumah Tangga	210 Rumah Tangga	2.696.000.000,00	2.714.400.000,00	2.714.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	6 Dokumen	3 Dokumen	450.000.000,00	196.300.000,00	196.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT					1.213.175.000,00	215.390.000,00	215.390.000,00	
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					1.213.175.000,00	215.390.000,00	215.390.000,00	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100; 100 Persen; Persen	100; 100 Persen; Persen	5.262.511.054,00	3.793.441.632,00	3.835.441.632,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/relokasi	1 Jenis	1 Jenis	6.800.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen	850.000,00	340.000,00	340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	1 Dokumen	850.000,00	340.000,00	340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	1 Dokumen	850.000,00	340.000,00	340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen	850.000,00	340.000,00	340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	850.000,00	340.000,00	340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	850.000,00	340.000,00	340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	850.000,00	340.000,00	340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	850.000,00	340.000,00	340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/relokasi	2 Jenis	2 Jenis	5.950.000,00	2.380.000,00	2.380.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	850.000,00	340.000,00	340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	20 Orang	20 Orang	850.000,00	340.000,00	340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.02.2.02.0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	1 Dokumen	1 Dokumen	850.000,00	340.000,00	340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.02.2.02.0007	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	850.000,00	340.000,00	340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.02.2.02.0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	850.000,00	340.000,00	340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.04.02.2.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	30 Orang	30 Orang	850.000,00	340.000,00	340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.02.2.02.0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	30 Orang	30 Orang	850.000,00	340.000,00	340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi	10 Unit	10 Unit	1.200.425.000,00	210.290.000,00	210.290.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	4 Unit Rumah	5 Unit Rumah	997.875.000,00	108.930.000,00	108.930.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	4 Unit Rumah	2 Unit Rumah	200.000.000,00	100.340.000,00	100.340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.02.2.03.0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	5 Unit Rumah	5 Unit Rumah	850.000,00	340.000,00	340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.02.2.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Unit Rumah	1 Unit Rumah	850.000,00	340.000,00	340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.02.2.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	5 Unit Rumah	5 Unit Rumah	850.000,00	340.000,00	340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
SPM BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						6.292.218.661,00	2.708.821.936,00	2.726.083.732,00	
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						4.098.122.307,00	1.443.022.486,00	1.458.039.382,00	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 Persen	100 Persen	4.098.122.307,00	1.443.022.486,00	1.458.039.382,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang ditindaklanjuti	100 persen	100 persen	3.131.876.789,00	428.607.250,00	657.206.246,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		Persentase peningkatan kapasitas anggota Linmas	30,78 persen	30,78 persen					
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	4.329.800,00	600.000,00	600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	1.102.957.734,00	53.451.050,00	48.346.050,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	2 Dokumen	4.930.000,00	4.450.000,00	63.205.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	9 Dokumen	9 Dokumen	5.280.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	700 Orang	850 Orang	68.865.300,00	95.500.100,00	105.610.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12 laporan	12 laporan	1.159.782.151,00	23.120.000,00	33.125.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	12 Laporan	773.711.404,00	241.546.300,00	246.553.196,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayanijumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	1 Laporan	6.770.400,00	2.839.800,00	2.839.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentrman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	21 Unit	21 Unit	5.250.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.0022	Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	-	9 Dokumen	-	-	81.043.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.0023	Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	9 Dokumen	-	-	62.574.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	-	25 Orang	-	-	6.210.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	100 persen	100 persen	958.933.018,00	1.013.365.236,00	792.332.136,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	12 Laporan	242.338.517,00	576.227.750,00	496.879.750,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	12 Laporan	584.704.501,00	384.437.486,00	242.752.386,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	12 Laporan	131.890.000,00	52.700.000,00	52.700.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase pelanggaran perda yang ditindaklanjuti	100 persen	100 persen	7.312.500,00	1.050.000,00	8.501.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	12 Laporan	12 Laporan	7.312.500,00	1.050.000,00	8.501.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					2.194.096.354,00	1.265.799.450,00	1.268.044.350,00	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	45 %	100 %	1.224.277.604,00	624.791.000,00	624.791.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Capaian Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	70 %	100 %	48.312.000,00	184.500.000,00	184.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	1800 Orang	1000 Orang	46.212.000,00	183.000.000,00	183.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	2.100.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Capaian Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	80 %	80 %	623.275.000,00	108.603.000,00	108.603.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	28 Unit	1 Unit	315.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	200 Orang	200 Orang	38.750.000,00	20.095.000,00	20.095.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	16.490.000,00	16.490.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	12 laporan	17.000.000,00	4.618.000,00	4.618.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	700.000,00	700.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	10 Kawasan	1 Kawasan	147.525.000,00	21.700.000,00	21.700.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Capaian Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	100 %	522.695.604,00	326.728.000,00	326.728.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	1 Laporan	999.900,00	999.900,00	999.900,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	1 Dokumen	137.570.000,00	93.381.700,00	93.381.700,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1000 Orang	1000 Orang	284.125.704,00	139.823.400,00	139.823.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	92.523.000,00	92.523.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %	100 %	999.813.750,00	645.968.450,00	648.213.350,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	8,81 % Menit	8,81 % Menit				
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	100 %	100 %	935.661.800,00	583.374.450,00	585.619.350,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pen cegahan/Penanggulan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	0 Dokumen	1.000.000,00	-	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	0 Dokumen	29.925.000,00	-	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	120 Orang	0 Orang	5.935.000,00	-	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	3 Unit	62 Unit	714.797.400,00	412.252.200,00	411.102.100,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04.2.01.0026	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	150 Laporan	150 Laporan	184.004.400,00	171.122.250,00	174.517.250,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	88 %	100 %	30.074.250,00	48.284.000,00	48.284.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	50 Orang	50 Orang	9.999.750,00	48.284.000,00	48.284.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04.2.04.0007	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran	10 Desa/Ke lurahan	10 Desa/Ke lurahan	20.074.500,00	-	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Capaian Pelayanan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	100 %	100 %	34.077.700,00	14.310.000,00	14.310.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan	12 Laporan	19.999.700,00	14.310.000,00	14.310.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 Laporan	0 Laporan	14.078.000,00	-	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
SPM BIDANG SOSIAL					10.482.799.480,00	10.078.294.436,00	10.055.333.926,00	
DINAS SOSIAL					10.482.799.480,00	10.078.294.436,00	10.055.333.926,00	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	80 Persen	100 Persen	10.461.169.460,00	10.010.017.736,00	9.990.057.226,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti ber	80 Persen	80 Persen	10.272.544.780,00	9.905.742.736,00	9.882.782.226,00	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1112 Orang	1112 Orang	8.993.066.296,00	8.958.618.715,00	8.934.487.825,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	37.162.500,00	28.385.000,00	34.571.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	178.703.000,00	107.353.000,00	107.353.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang	16.000.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	376.319.924,00	270.924.412,00	243.524.412,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	20.166.000,00	12.087.500,00	10.837.500,00	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	90.821.180,00	99.447.206,00	102.447.206,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	65.375.000,00	8.375.000,00	8.375.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	295.658.700,00	234.679.903,00	250.314.283,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	73.099.872,00	70.350.000,00	72.350.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	13.875.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	112.297.308,00	102.522.000,00	105.522.000,00	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	544.268.420,00	436.555.080,00	440.367.580,00	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	85 Persen	85 Persen	210.254.700,00	172.551.700,00	172.551.700,00	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	130.952.200,00	127.712.200,00	127.712.200,00	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	10.900.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	5 Orang	25.200.000,00	28.512.500,00	28.512.500,00	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15 Orang	11.652.500,00	5.714.500,00	5.714.500,00	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01.0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75 Orang	31.550.000,00	7.062.500,00	7.062.500,00	DINAS SOSIAL

Rencana Perubahan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut.

Tabel 5. 4 Rekapitulasi Perubahan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2026

N o	Perangkat Daerah / PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Aktivitas												Output Semula Sesuai Kepmendagri						Anggaran	
																Semula			Menjadi			Semula	
				Semula						Menjadi						Indikator	Targe t	Satu an	Indikator	Targ et	Satua n	Semula	Menjadi
	Urusan Kelembagaan																					2.017.891.000	2.017.891.000
	Sekretariat Daerah																					245.798.000	245.798.000
	Bagian Organisasi																					116.222.000	116.222.000
1	PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSA NAAN	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas kelembagaan pengampu program/kegiatan urusan keistimewaan di Kab. Bantul	2	lembaga	Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan	1	dokumen	Peningkatan kapasitas kelembagaan pengampu program/kegiatan urusan keistimewaan di Kab. Bantul	2	lembaga	Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan	1	dokumen	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	1	lembaga	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	1	lembaga	53.247.000	53.247.000
2	PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSA NAAN	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah PD dengan Tingkat implementasi Budaya Pemerintahan berkategori Baik	25 dari 46	PD	Jumlah PD dengan Tingkat implementasi Budaya Pemerintahan berkategori Baik	25 dari 46	PD	Jumlah PD dengan Tingkat implementasi Budaya Pemerintahan berkategori Baik	25 dari 46	PD	Jumlah PD dengan Tingkat implementasi Budaya Pemerintahan berkategori Baik	25 dari 46	PD	Jumlah dokumen hasil implementasi Budaya	2	dokumen	Jumlah dokumen hasil implementasi Budaya	2	dokumen	62.975.000	62.975.000
	Bagian Tata Pemerintahan																					35.000.000	35.000.000
3	PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSA NAAN	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan / Kelurahan	Jumlah Kapanewon yang Berkinerja Baik	13	Kapanewon	Jumlah Kapanewon yang Berkinerja Baik	13	Kapanewon	Jumlah Kapanewon yang Berkinerja Baik	13	Kapanewon	Jumlah Kapanewon yang Berkinerja Baik	13	Kapanewon	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	1	dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	1	dokumen	35.000.000	35.000.000

N o	Perangkat Daerah / PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Aktivitas												Output Semula Sesuai Kepmendagri						Anggaran		
																Semula			Menjadi					Indikator
				Semula						Menjadi						Semula	Menjadi							
Bagian Hukum																							94.576.000	94.576.000
4	PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAA N YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSA NAAN	Penataan Kelembaga an dan Ketatalaksa naan Keistimewa an	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	1. Peraturan Daerah tentang Pamong Kalurahan	1. 1. 2. 1	1. 1. 2. dokume n	1. Peraturan Daerah tentang Pamong Kalurahan	1. 1. 2. 1	1. 1. 2. dokume n	1. Perubahan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan	1. 1. 2. 1	1. 1. 2. dokume n	1. Perubahan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan	1. 1. 2. 1	1. 1. 2. dokume n	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Disusun	2	dokume n	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Disusun	2	dokum en	44.576.000	44.576.000	
5	PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAA N YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSA NAAN	Penataan Kelembaga an dan Ketatalaksa naan Keistimewa an	Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	1. Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Kalurahan	1. 1. 75 2. 1	1. 1. orang 2. dokume n	1. Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan produk hukum kalurahan dengan peserta dari unsur pamong kalurahan dan Badan Permusyawar atan Kalurahan	1. 1. 75 2. 1	1. 1. orang 2. dokume n	1. Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Kalurahan	1. 1. 75 2. 1	1. 1. orang 2. dokume n	1. Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan produk hukum kalurahan dengan peserta dari unsur pamong kalurahan dan Badan Permusyawar atan Kalurahan	1. 1. 75 2. 1	1. 1. orang 2. dokume n	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	1	dokume n	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	1	dokum en	50.000.000	50.000.000	

N o	Perangkat Daerah / PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Aktivitas												Output Semula Sesuai Kepmendagri						Anggaran			
																Semula			Menjadi						
				Semula						Menjadi						Indikator	Targe t	Satu an	Indikator	Targ et	Satua n	Semula	Menjadi		
							produk hukum kalurahan							produk hukum kalurahan											
	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah																					333.057.000	333.057.000		
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	1. Usulan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2026	1. 2. 3. 1	1. 2. 3. dokumen	1. Usulan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2026	1. 2. 3. dokumen	1. Usulan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2026	1. 2. 3. dokumen	1. Usulan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2026	1. 2. 3. dokumen	1. Usulan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2026	1. 2. 3. dokumen	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan	4	Dokumen	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan	4	Dokumen	85.103.000	85.103.000			
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Kegiatan Keistimewaan	1. Laporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan BKK Keistimewaan Tahun 2025 Tahap Akhir	1. 2. 3. 4	1. 2. 3. Laporan	1. Laporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan BKK Keistimewaan Tahun 2025 Tahap Akhir	1. 2. 3. Laporan	1. Laporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan BKK Keistimewaan Tahun 2025 Tahap Akhir	1. 2. 3. Laporan	1. Laporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan BKK Keistimewaan Tahun 2025 Tahap Akhir	1. 2. 3. Laporan	1. Laporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan BKK Keistimewaan Tahun 2025 Tahap Akhir	1. 2. 3. Laporan	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	7	Laporan	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	7	Laporan	62.633.000	62.633.000			

No	Perangkat Daerah / PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Aktivitas												Output Semula Sesuai Kepmendagri						Anggaran	
				Semula						Menjadi						Indikator	Target	Satuan	Menjadi			Semula	Menjadi
																			Indikator	Target	Satuan		
8	PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSA NAAN	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	1. Persiapan Pendaftaran Unesco Global Geopark (UGG) Gumuk Pasir Parangtritis2. Laporan Pengelolaan Situs Warisan Geologi (Geoheritage) Kabupaten Bantul3. Laporan Pengelolaan World Heritage UNESCO Sumbu Filosofi4. Kajian Detail Identifikasi Geodiversity	1. 12 dokumen 2. 13 laporan 3. 14 dokumen 4. 1 laporan	1. 12 dokumen 2. 13 laporan 3. 14 dokumen 4. 1 laporan	1. 12 dokumen 2. 13 laporan 3. 14 dokumen 4. 1 laporan	1. 12 dokumen 2. 13 laporan 3. 14 dokumen 4. 1 laporan	1. 12 dokumen 2. 13 laporan 3. 14 dokumen 4. 1 laporan	1. 12 dokumen 2. 13 laporan 3. 14 dokumen 4. 1 laporan	1. 12 dokumen 2. 13 laporan 3. 14 dokumen 4. 1 laporan	1. 12 dokumen 2. 13 laporan 3. 14 dokumen 4. 1 laporan	1. 12 dokumen 2. 13 laporan 3. 14 dokumen 4. 1 laporan	1. 12 dokumen 2. 13 laporan 3. 14 dokumen 4. 1 laporan	1. 12 dokumen 2. 13 laporan 3. 14 dokumen 4. 1 laporan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	4	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	4	Dokumen	185.321.000	185.321.000
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia																						150.000.000	150.000.000
9	PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSA NAAN	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Penyelenggaraa n Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	1. Jumlah ASN Kabupaten Bantul yang mengikuti Pelatihan Internalisasi keistimewaan	1. 30 Orang	1. 30 Orang	1. 30 Orang	1. 30 Orang	1. 30 Orang	1. 30 Orang	1. 30 Orang	1. 30 Orang	1. 30 Orang	1. 30 Orang	1. 30 Orang	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan Kegiatan	1	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan Kegiatan	1	Laporan	150.000.000	150.000.000
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah																						72.586.000	72.586.000
10	PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Kab. Bantul	Laporan Pengelolaan Dana Keistimewaan Kab. Bantul	3	Laporan	Laporan Pengelolaan Dana Keistimewaan Kab. Bantul	3	Laporan	Laporan Pengelolaan Dana Keistimewaan Kab. Bantul	3	Laporan	Laporan Pengelolaan Dana Keistimewaan Kab. Bantul	3	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	3	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	3	Laporan	72.586.000	72.586.000

N o	Perangkat Daerah / PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Aktivitas												Output Semula Sesuai Kepmendagri						Anggaran		
																Semula			Menjadi					
				Semula						Menjadi						Indikator	Targe t	Satu an	Indikator	Targ et	Satua n	Semula	Menjadi	
	DAN KETATALAKSANAAN																							
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan																					156.500.000	156.500.000	
11	PROGRAM PENYELENGGAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	1. Peningkatan Kapasitas Pamong 2. Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 3. Laporan Pendampingan Assement Kapanewon 4. Laporan Pendampingan Rencana Aksi 5. Laporan Pendampingan Proposal BKK 6. Laporan Monev BKK 7. Forum Komunikasi Reformas Kalurahan	1. 22 Orang 2. 1 an 3. 1 Dokumen 4. 1 Dokumen 5. 1 n 6. 1 Dokumen 7. 1 Dokumen	1. 2.Laporan Pamong 2. 1 Monitoring 3. 1 Dokumen 4. 1 Birokrasi 5. 1 n 6. 1 Dokumen 7. 1 Dokumen	1. Peningkatan Kapasitas Pamong 2. Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 3. Laporan Pendampingan Assement Kapanewon 4. Laporan Pendampingan Rencana Aksi 5. Laporan Pendampingan Proposal BKK 6. Laporan Monev BKK 7. Forum Komunikasi Reformas Kalurahan	1. 22 Orang 2. 1 an 3. 1 Dokumen 4. 1 Dokumen 5. 1 n 6. 1 Dokumen 7. 1 Dokumen	1. Peningkatan Kapasitas Pamong 2. Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 3. Laporan Pendampingan Assement Kapanewon 4. Laporan Pendampingan Rencana Aksi 5. Laporan Pendampingan Proposal BKK 6. Laporan Monev BKK 7. Forum Komunikasi Reformas Kalurahan	1. 22 Orang 2. 1 an 3. 1 Dokumen 4. 1 Dokumen 5. 1 n 6. 1 Dokumen 7. 1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang di dampingi	2	dokumen	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang di dampingi	2	dokumen	156.500.000	156.500.000						
	Dinas Kesehatan																					549.950.000	549.950.000	
12	PROGRAM PENYELENGGAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Puskesmas dengan pengembangan DGS "Halo Bantul Sehat"	8	Puskesmas dengan pengembangan DGS "Halo Bantul Sehat"	8	Puskesmas dengan pengembangan DGS "Halo Bantul Sehat"	8	Puskesmas dengan pengembangan DGS "Halo Bantul Sehat"	8	Puskesmas dengan pengembangan DGS "Halo Bantul Sehat"	8	Puskesmas dengan pengembangan DGS "Halo Bantul Sehat"	8	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1	dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1	dokumen	549.950.000	549.950.000	
	Kapanewon Kabupaten Bantul (17 Kapanewon)																					510.000.000	510.000.000	

No	Perangkat Daerah / PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Aktivitas												Output Semula Sesuai Kepmendagri						Anggaran	
																Semula			Menjadi			Semula	
				Semula						Menjadi						Indikator	Targe t	Satu an	Indikator	Targ et	Satua n	Semula	Menjadi
Kapanewon Bambanglipuro																						30.000.000	30.000.000
13	PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAA N YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSA NAAN	Penataan Kelembaga an dan Ketatalaksa naan Keistimewa an	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kem antren dan Kalurahan/ Kelurahan	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon Bambanglipur o dan KalurahanTahun 2028	1. 1. dokumen 2. 2. 1. 3. dokume n	1. 1. dokumen 2. 2. 1. 3. dokume n	1. 1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon Bambanglipur o dan KalurahanTahun 2028	1. 1. dokumen 2. 2. 1. 3. dokume n	1. 1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon Bambanglipur o dan KalurahanTahun 2028	1. 1. dokumen 2. 2. 1. 3. dokume n	1. 1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon Bambanglipur o dan KalurahanTahun 2028	1. 1. dokumen 2. 2. 1. 3. dokume n	1. 1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon Bambanglipur o dan KalurahanTahun 2028	1. 1. dokumen 2. 2. 1. 3. dokume n	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kem antren dan Kalurahan/Kelur ahan yang di dampingi	3	Dokume n	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kem antren dan Kalurahan/Kelur ahan yang di dampingi	3	Doku men	30.000.000	30.000.000	
Kapanewon Banguntapan																						30.000.000	30.000.000
14	PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAA N YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSA NAAN	Penataan Kelembaga an dan Ketatalaksa naan Keistimewa an	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kem antren dan Kalurahan/ Kelurahan	1. Dokumen Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2027	1. 1. dokumen 2. 2. 1. 3. dokume n	1. 1. dokumen 2. 2. 1. 3. dokume n	1. Dokumen Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2027	1. 1. dokumen 2. 2. 1. 3. dokume n	1. Dokumen Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2027	1. 1. dokumen 2. 2. 1. 3. dokume n	1. Dokumen Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2027	1. 1. dokumen 2. 2. 1. 3. dokume n	1. Dokumen Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2027	1. 1. dokumen 2. 2. 1. 3. dokume n	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kem antren dan Kalurahan/Kelura han yang di dampingi	3	Dokume n	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kem antren dan Kalurahan/Kelur ahan yang di dampingi	3	Doku men	30.000.000	30.000.000	

N o	Perangkat Daerah / PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Aktivitas												Output Semula Sesuai Kepmendagri						Anggaran	
																Semula			Menjadi				
				Semula						Menjadi						Indikator	Targe t	Satu an	Indikator	Targ et	Satua n	Semula	Menjadi
				pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan			pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan			pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan			pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan										
	Kapanewon Bantul																					30.000.000	30.000.000
15	PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAA N YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSA NAAN	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penerapan dan Pendampingan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	1. Dokumen Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2027	1. 1. dokumen 2. n 3. dokumen	1. 1. dokumen 2. n 3. dokumen	1. Dokumen Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2027	1. 1. dokumen 2. n 3. dokumen	1. 1. dokumen 2. n 3. dokumen	1. Dokumen Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2027	1. 1. dokumen 2. n 3. dokumen	1. 1. dokumen 2. n 3. dokumen	1. Dokumen Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2027	1. 1. dokumen 2. n 3. dokumen	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang di dampingi	3	Dokumen	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang di dampingi	3	Dokumen	30.000.000	30.000.000	
	Kapanewon Dlingo																					30.000.000	30.000.000
16	PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAA N YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSA NAAN	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028	1. 1. dokumen 2. n 3. dokumen	1. 1. dokumen 2. n 3. dokumen	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028	1. 1. dokumen 2. n 3. dokumen	1. 1. dokumen 2. n 3. dokumen	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028	1. 1. dokumen 2. n 3. dokumen	1. 1. dokumen 2. n 3. dokumen	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028	1. 1. dokumen 2. n 3. dokumen	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang di dampingi	3	Dokumen	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang di dampingi	3	Dokumen	30.000.000	30.000.000	

No	Perangkat Daerah / PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Aktivitas												Output Semula Sesuai Kepmendagri						Anggaran	
				Semula						Menjadi						Indikator	Target	Satuan	Indikator	Target	Satuan	Semula	Menjadi
				dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan			dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan			dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan			dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan										
	Kapanewon Imogiri																					30.000.000	30.000.000
17	PROGRAM PENYELENGGAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028	1. 1. dokumen	1. 2. n	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028	1. 1. dokumen	1. 2. n	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028	1. 1. dokumen	1. 2. n	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028	1. 1. dokumen	1. 2. n	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang di dampingi	3	Dokumen	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang di dampingi	3	Dokumen	30.000.000	30.000.000
	Kapanewon Jetis																					30.000.000	30.000.000
18	PROGRAM PENYELENGGAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028	1. 1. dokumen	1. 2. n	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028	1. 1. dokumen	1. 2. n	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028	1. 1. dokumen	1. 2. n	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028	1. 1. dokumen	1. 2. n	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang di dampingi	3	Dokumen	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang di dampingi	3	Dokumen	30.000.000	30.000.000

N o	Perangkat Daerah / PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Aktivitas												Output Semula Sesuai Kepmendagri						Anggaran	
																Semula			Menjadi				
				Semula						Menjadi						Indikator	Targe t	Satu an	Indikator	Targ et	Satua n	Semula	Menjadi
				pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan			pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan			pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan			pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan										
	Kapanewon Kasihan																				30.000.00 0	30.000.00 0	
1 9	PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAA N YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSA NAAN	Penataan Kelebaga an dan Ketatalaksa naan Keistimewa an	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kem antren dan Kalurahan/ Kelurahan	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan	1. 1. dokume n 2. dokume n 3. dokume n	1. 1. dokume n 2. dokume n	1. 1. dokume n 2. dokume n	1. 1. dokume n 2. dokume n	1. 1. dokume n 2. dokume n	1. 1. dokume n 2. dokume n	1. 1. dokume n 2. dokume n	1. 1. dokume n 2. dokume n	1. 1. dokume n 2. dokume n	1. 1. dokume n 2. dokume n	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kem antren dan Kalurahan/Kelura han yang di dampingi	3	Dokume n	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kem antren dan Kalurahan/Kelur ahan yang di dampingi	3	Doku men	30.000.00 0	30.000.00 0	
	Kapanewon Kretek																				30.000.00 0	30.000.00 0	
2 0	PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAA N YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSA NAAN	Penataan Kelebaga an dan Ketatalaksa naan Keistimewa an	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kem antren dan Kalurahan/ Kelurahan	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil	1. 1. dokume n 2. dokume n 3. dokume n	1. 1. dokume n 2. dokume n	1. 1. dokume n 2. dokume n	1. 1. dokume n 2. dokume n	1. 1. dokume n 2. dokume n	1. 1. dokume n 2. dokume n	1. 1. dokume n 2. dokume n	1. 1. dokume n 2. dokume n	1. 1. dokume n 2. dokume n	1. 1. dokume n 2. dokume n	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kem antren dan Kalurahan/Kelura han yang di dampingi	3	Dokume n	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kem antren dan Kalurahan/Kelur ahan yang di dampingi	3	Doku men	30.000.00 0	30.000.00 0	

N o	Perangkat Daerah / PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Aktivitas												Output Semula Sesuai Kepmendagri						Anggaran	
																Semula			Menjadi				
				Semula						Menjadi						Indikator	Targe t	Satu an	Indikator	Targ et	Satua n	Semula	Menjadi
				koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan			koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan			koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan			koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan										
	Kapanewon Pajangan																			30.000.000	30.000.000		
21	PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAA N YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSA NAAN	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan	1. 1. dokumen 2. 2. dokumen 3. 3. dokumen dokumen	1. 1. dokumen 2. 2. dokumen 3. 3. dokumen dokumen	1. 1. dokumen 2. 2. dokumen 3. 3. dokumen dokumen	1. 1. dokumen 2. 2. dokumen 3. 3. dokumen dokumen	1. 1. dokumen 2. 2. dokumen 3. 3. dokumen dokumen	1. 1. dokumen 2. 2. dokumen 3. 3. dokumen dokumen	1. 1. dokumen 2. 2. dokumen 3. 3. dokumen dokumen	1. 1. dokumen 2. 2. dokumen 3. 3. dokumen dokumen	1. 1. dokumen 2. 2. dokumen 3. 3. dokumen dokumen	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang di dampingi	3	Dokumen	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang di dampingi	3	Dokumen	30.000.000	30.000.000		
	Kapanewon Pandak																			30.000.000	30.000.000		
22	PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAA N YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSA NAAN	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan	1. 1. dokumen 2. 2. dokumen 3. 3. dokumen dokumen	1. 1. dokumen 2. 2. dokumen 3. 3. dokumen dokumen	1. 1. dokumen 2. 2. dokumen 3. 3. dokumen dokumen	1. 1. dokumen 2. 2. dokumen 3. 3. dokumen dokumen	1. 1. dokumen 2. 2. dokumen 3. 3. dokumen dokumen	1. 1. dokumen 2. 2. dokumen 3. 3. dokumen dokumen	1. 1. dokumen 2. 2. dokumen 3. 3. dokumen dokumen	1. 1. dokumen 2. 2. dokumen 3. 3. dokumen dokumen	1. 1. dokumen 2. 2. dokumen 3. 3. dokumen dokumen	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang di dampingi	3	Dokumen	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang di dampingi	3	Dokumen	30.000.000	30.000.000		

N o	Perangkat Daerah / PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Aktivitas												Output Semula Sesuai Kepmendagri						Anggaran	
																Semula			Menjadi				
				Semula						Menjadi						Indikator	Targe t	Satu an	Indikator	Targ et	Satua n	Semula	Menjadi
				hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan			hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan			hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan			hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan										
	Kapanewon Piyungan																					30.000.00 0	30.000.00 0
2 3	PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAA N YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSA NAAN	Penataan Kelembaga an dan Ketatalaksa naan Keistimewa an	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kem antren dan Kalurahan/ Kelurahan	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan	1. 1. 2. n 3. dokume n	1. 1. 2. n 3. dokume n	1. 1. 2. n 3. dokume n	1. 1. 2. n 3. dokume n	1. 1. 2. n 3. dokume n	1. 1. 2. n 3. dokume n	1. 1. 2. n 3. dokume n	1. 1. 2. n 3. dokume n	1. 1. 2. n 3. dokume n	1. 1. 2. n 3. dokume n	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kem antren dan Kalurahan/Kelura han yang di dampingi	3	Dokume n	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kem antren dan Kalurahan/Kelur ahan yang di dampingi	3	Doku men	30.000.00 0	30.000.00 0	
	Kapanewon Pleret																					30.000.00 0	30.000.00 0
2 4	PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAA N YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSA NAAN	Penataan Kelembaga an dan Ketatalaksa naan Keistimewa an	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kem antren dan Kalurahan/ Kelurahan	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan	1. 1. 2. n 3. dokume n	1. 1. 2. n 3. dokume n	1. 1. 2. n 3. dokume n	1. 1. 2. n 3. dokume n	1. 1. 2. n 3. dokume n	1. 1. 2. n 3. dokume n	1. 1. 2. n 3. dokume n	1. 1. 2. n 3. dokume n	1. 1. 2. n 3. dokume n	1. 1. 2. n 3. dokume n	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kem antren dan Kalurahan/Kelura han yang di dampingi	3	Dokume n	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kem antren dan Kalurahan/Kelur ahan yang di dampingi	3	Doku men	30.000.00 0	30.000.00 0	

No	Perangkat Daerah / PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Aktivitas												Output Semula Sesuai Kepmendagri						Anggaran	
				Semula						Menjadi						Indikator	Target	Satuan	Indikator	Target	Satuan	Semula	Menjadi
				3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan			3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan			3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan			3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan										
	Kapanewon Pundong																					30.000.000	30.000.000
25	PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSA NAAN	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028	1. 1. dokumen	1. 2. dokumen	1. 1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028	1. 1. 1. dokumen	1. 1. 2. dokumen	1. 1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028	1. 1. 1. dokumen	1. 1. 2. dokumen	1. 1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028	1. 1. 1. dokumen	1. 1. 2. dokumen	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang di dampingi	3	Dokumen	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang di dampingi	3	Dokumen	30.000.000	30.000.000
	Kapanewon Sanden																					30.000.000	30.000.000
26	PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSA NAAN	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028	1. 1. dokumen	1. 2. dokumen	1. 1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028	1. 1. 1. dokumen	1. 1. 2. dokumen	1. 1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028	1. 1. 1. dokumen	1. 1. 2. dokumen	1. 1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028	1. 1. 1. dokumen	1. 1. 2. dokumen	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang di dampingi	3	Dokumen	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang di dampingi	3	Dokumen	30.000.000	30.000.000

N o	Perangkat Daerah / PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Aktivitas												Output Semula Sesuai Kepmendagri						Anggaran	
																Semula			Menjadi				
				Semula						Menjadi						Indikator	Targe t	Satu an	Indikator	Targ et	Satua n	Semula	Menjadi
				Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan			Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan			Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan													
	Kapanewon Sedayu																			30.000.00 0	30.000.00 0		
2 7	PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAA N YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSA NAAN	Penataan Kelebaga an dan Ketatalaksa naan Keistimewa an	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kem antren dan Kalurahan/ Kelurahan	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan	1. 2. 3. dokume n	1. 2. 3. dokume n	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan	1. 2. 3. dokume n	1. 2. 3. dokume n	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan	1. 2. 3. dokume n	1. 2. 3. dokume n	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan	1. 2. 3. dokume n	1. 2. 3. dokume n	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kem antren dan Kalurahan/Kelura han yang di dampingi	3	Dokume n	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kem antren dan Kalurahan/Kelur ahan yang di dampingi	3	Doku men	30.000.00 0	30.000.00 0
	Kapanewon Sewon																			30.000.00 0	30.000.00 0		
2 8	PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAA N YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSA NAAN	Penataan Kelebaga an dan Ketatalaksa naan Keistimewa an	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kem antren dan Kalurahan/ Kelurahan	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan	1. 2. 3. dokume n	1. 2. 3. dokume n	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan	1. 2. 3. dokume n	1. 2. 3. dokume n	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan	1. 2. 3. dokume n	1. 2. 3. dokume n	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan	1. 2. 3. dokume n	1. 2. 3. dokume n	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kem antren dan Kalurahan/Kelura han yang di dampingi	3	Dokume n	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kem antren dan Kalurahan/Kelur ahan yang di dampingi	3	Doku men	30.000.00 0	30.000.00 0

N o	Perangkat Daerah / PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Aktivitas												Output Semula Sesuai Kepmendagri						Anggaran	
																Semula			Menjadi			Semula	
				Semula						Menjadi						Indikator	Targe t	Satu an	Indikator	Targ et	Satua n	Semula	Menjadi
				Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan			Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan			Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan													
	Kapanewon Srandakan																			30.000.000	30.000.000		
29	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang di dampingi	3	Dokumen	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang di dampingi	3	Dokumen	30.000.000	30.000.000		

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas Semula			Aktivitas Menjadi			Output Sesuai KEPMENDAGRI				Anggaran	
				Aktivitas	Targe t	Satuan	Aktivitas	Targe t	Satuan	Indikator	Target Semul a	Target Menjad i	Satuan	Semula	Menjadi
I	Urusan Kebudayaan													33,121,630,500	32,487,434,700
1	Dinas Kebudayaan													8,735,941,000	8,733,945,000
1.1	Program Penyelenggaraa n Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	3	3	dokume n	499,052,000	499,052,000
				Peringatan Peristiwa Sejarah	3	kali	Peringatan Peristiwa Sejarah	3	kali						
				Publikasi Sejarah	2	kali	Publikasi Sejarah	2	kali						
				internalisasi kesejarahan melalui pembinaan komunitas	3	Komunitas	internalisasi kesejarahan melalui pembinaan komunitas	3	Komunitas						
1.2	Program Penyelenggaraa n Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra	4	4	Laporan	799,399,500	799,399,500
				Kompetisi Kebahasaan dan Sastra (Tingkat Kabupaten & Tingkat DIY)	7	jenis	Kompetisi Kebahasaan dan Sastra (Tingkat Kabupaten & Tingkat DIY)	7	jenis						
				Pawiyatan Pranatacara	5	kali	Pawiyatan Pranatacara	5	kali						
				Gelar Sastra	1	kali	Gelar Sastra	1	kali						
				Dokumentasi Sastra	1	judul	Dokumentasi Sastra	1	judul						
1.3	Program Penyelenggaraa n Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman							Jumlah Permuseuman yang dibina dan dikelola	17	17	Unit	299,280,000	299,280,000
				Lomba Cerdas Cermat Museum (Tingkat Kabupaten dan Provinsi)	2	kali	Lomba Cerdas Cermat Museum (Tingkat Kabupaten dan Provinsi),	2	kali						

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas Semula			Aktivitas Menjadi			Output Sesuai KEPMENDAGRI				Anggaran	
				Aktivitas	Target	Satuan	Aktivitas	Target	Satuan	Indikator	Target Semula	Target Menjadi	Satuan	Semula	Menjadi
				Peningkatan Kompetensi SDM Museum	1	kali	Peningkatan Kompetensi SDM Museum	1	kali						
				Wajib Kunjung Museum	400	orang	Wajib Kunjung Museum	400	orang						
				Fasilitasi Komunitas Museum	2	kali	Fasilitasi Komunitas Museum	2	kali						
1.4	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya							Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola	20	20	objek	398,560,000	398,560,000
				Penetapan Cagar Budaya	20	rekomendasi	Penetapan Cagar Budaya	20	rekomendasi						
				Sosialisasi Cagar Budaya	2	kali	Sosialisasi Cagar Budaya	2	kali						
				Fasilitasi Forum Pelestari Cagar Budaya dan Warisan Budaya	3	kali	Fasilitasi Forum Pelestari Cagar Budaya dan Warisan Budaya	3	kali						
1.5	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya							Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan	10	10	objek	509,760,000	509,760,000
				Atraksi WBTB Rintisan Desa Budaya	10	desa	Atraksi WBTB Rintisan Desa Budaya	10	desa						
				Festival Olahraga/Permainan Tradisional	1	kali	Festival Olahraga/Permainan Tradisional	1	kali						
				Workshop WBTB	2	kali	Workshop WBTB	2	kali						
				Nyantrik Pada Pelestari	1	kali	Nyantrik Pada Pelestari	1	kali						
1.6	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia							Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi	1	1	Objek	99,880,000	99,880,000
				Kajian Warisan Budaya Takbenda	1	dokumen	Kajian Warisan Budaya Takbenda	1	dokumen						

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas Semula			Aktivitas Menjadi			Output Sesuai KEPMENDAGRI				Anggaran	
				Aktivitas	Target	Satuan	Aktivitas	Target	Satuan	Indikator	Target Semula	Target Menjadi	Satuan	Semula	Menjadi
1.7	Program Penyelenggaraa n Keistimewaaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Sarana Prasarana Keistimewaaan Urusan Kebudayaan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya							Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	3	3	Unit	951,920,000	951,920,000
				Gamelan Kuningan (Rintisan desa budaya)	3	set	Gamelan Kuningan (Rintisan desa budaya)	3	set						
1.8	Program Penyelenggaraa n Keistimewaaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya							Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Kalurahan Budaya Kategori Tumbuh dan Berkembang	2	2	Laporan	192,856,500	192,856,500
				Festival Rintisan Desa Budaya	1	kali	Festival Rintisan Desa Budaya	1	kali						
				Evaluasi Penetapan Rintisan desa Budaya	1	dokumen	Evaluasi Penetapan Rintisan desa Budaya	1	dokumen						
1.9	Program Penyelenggaraa n Keistimewaaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni							Jumlah Lembaga Penggiat seni yang dibina	3	3	Lembaga	393,327,000	393,327,000
				Lomba Lukis Kyoto-DIY	1	kali	Lomba Lukis Kyoto-DIY	1	kali						
				Workshop dan Lomba Film	1	kali	Workshop dan Lomba Film	1	kali						
				Fasilitasi Dewan Kebudayaan Bantul	8	kali	Fasilitasi Dewan Kebudayaan Bantul	8	kali						
1.10	Program Penyelenggaraa n Keistimewaaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya							Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	1	1	Laporan	279,798,000	279,798,000

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas Semula			Aktivitas Menjadi			Output Sesuai KEPMENDAGRI				Anggaran	
				Aktivitas	Target	Satuan	Aktivitas	Target	Satuan	Indikator	Target Semula	Target Menjadi	Satuan	Semula	Menjadi
				Misi Kebudayaan Ke Dalam Pulau Jawa	1	kali	Misi Kebudayaan Ke Dalam Pulau Jawa	1	kali						
1.1 1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Penghargaan Seniman dan Budayawan							Jumlah Seniman dan Budayawan yang mendapatkan penghargaan	6	6	orang	127,999,800	127,999,800
				Penghargaan Seniman Budayawan	2	orang	Penghargaan Seniman Budayawan	2	orang						
				Penghargaan Pelestari Adat Tradisi	2	kelompok	Penghargaan Pelestari Adat Tradisi	2	kelompok						
				Penghargaan Pelestari Cagar Budaya	2	orang	Penghargaan Pelestari Cagar Budaya	2	orang						
1.1 2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Festival Kebudayaan Yogyakarta							Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta	3	3	Laporan	383,772,000	381,776,000
				Pentas Seni	1	kali	Pentas Seni	1	kali						
				Pawai seni	1	kali	Pawai seni	1	kali						
				Pasar Seni	1	kali	Pasar Seni	1	kali						
1.1 3	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Gelar Budaya Jogja							Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	7	7	Laporan	1,876,287,800	1,876,287,800
				Mataram Culture Fest	1	kali	Mataram Culture Fest	1	kali						
				Pengiriman Festival Langen Carita ke DIY	1	kali	Pengiriman Festival Langen Carita ke DIY	1	kali						
				Festival Ketoprak tingkat Kabupaten	1	kali	Festival Ketoprak tingkat Kabupaten	1	kali						
				Pengiriman Festival Ketoprak tingkat DIY	1	kali	Pengiriman Festival Ketoprak tingkat DIY	1	kali						
				Festival Teater tingkat Kabupaten	1	kali	Festival Teater tingkat Kabupaten	1	kali						

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas Semula			Aktivitas Menjadi			Output Sesuai KEPMENDAGRI				Anggaran	
				Aktivitas	Target	Satuan	Aktivitas	Target	Satuan	Indikator	Target Semula	Target Menjadi	Satuan	Semula	Menjadi
				Pengiriman Festival Teater tingkat DIY	1	kali	Pengiriman Festival Teater tingkat DIY	1	kali						
				Festival Langen Carita tingkat Kabupaten	1	kali	Festival Langen Carita tingkat Kabupaten	1	kali						
1.1 4	Program Penyelenggaraa n Keistimewaaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Publikasi Seni dan Budaya Daerah							Jumlah Publikasi Seni dan Budaya Daerah	2	2	dokume n	74,120,000	74,120,000
				Publikasi Melalui Media Cetak	2	kali	Publikasi Melalui Media Cetak	2	kali						
				Publikasi Pariwara Seni Budaya melalui Media TV	3	kali	Publikasi Pariwara Seni Budaya melalui Media TV	3	kali						
1.1 5	Program Penyelenggaraa n Keistimewaaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi							Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang dibina	120	120	orang	42,566,200	42,566,200
				Sarasehan Himpunan Penghayat Kepercayaan	120	orang	Sarasehan Himpunan Penghayat Kepercayaan	120	orang						
				Ritual Sarasehan Himpunan Penghayat Kepercayaan	4	kali	Ritual Sarasehan Himpunan Penghayat Kepercayaan	4	kali						
1.1 6	Program Penyelenggaraa n Keistimewaaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat							Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai luhur dalam Masyarakat	4	4	Laporan	410,000,000	410,000,000
				Pembinaan Wayang Kulit / Pawiyatan Dalang	2	kali	Pembinaan Wayang Kulit / Pawiyatan Dalang	2	kali						
				Festival Dalang Anak dan Remaja Tk. Kabupaten	1	kali	Festival Dalang Anak dan Remaja Tk. Kabupaten	1	kali						

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas Semula			Aktivitas Menjadi			Output Sesuai KEPMENDAGRI				Anggaran	
				Aktivitas	Targe t	Satuan	Aktivitas	Targe t	Satuan	Indikator	Target Semul a	Target Menjad i	Satuan	Semula	Menjadi
				Pengiriman Festival Dalang Anak dan Remaja ke DIY	1	kali	Pengiriman Festival Dalang Anak dan Remaja ke DIY	1	kali						
				Pentas Wayang Kulit	1	kali	Pentas Wayang Kulit	1	kali						
1.1 7	Program Penyelenggaraa n Keistimewaaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Penyelenggaraa n Event Penggiat Seni							Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Even Penggiat Seni	3	3	Laporan	821,077,200	821,077,200
				Fasilitasi Kelompok Seni	50	kali	Fasilitasi Kelompok Seni	50	kali						
				Pentas Pastab (Pentas Pasar Seni dan Wisata Bantul)	4	kali	Pentas Pastab (Pentas Pasar Seni dan Wisata Bantul)	4	kali						
				Peristiwa Budaya : Pentas Seni Budaya santri dan Pagelaran Hari wayang Nasional	2	kali	Peristiwa Budaya : Pentas Seni Budaya santri dan Pagelaran Hari wayang Nasional	2	kali						
1.1 8	Program Penyelenggaraa n Keistimewaaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi							Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	3	3	Laporan	576,285,000	576,285,000
				Upacara Adat Tradisi	10	kali	Upacara Adat Tradisi	10	kali						
				Merti Dusun	20	kali	Merti Dusun	20	kali						
				Festival Upacara Adat	1	kali	Festival Upacara Adat	1	kali						
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi													3,197,052,000	3,197,052,000
2.1	Program Penyelenggaraa n Keistimewaaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya							Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	1	1	Dokume n	3,197,052,000	3,197,052,000
				Padat Karya pengembangan potensi desa	60	lokasi/pake t	Padat Karya pengembangan potensi desa	60	lokasi/pake t						
3	Dinas Pariwisata													150,000,000	150,000,000

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas Semula			Aktivitas Menjadi			Output Sesuai KEPMENDAGRI				Anggaran	
				Aktivitas	Target	Satuan	Aktivitas	Target	Satuan	Indikator	Target Semula	Target Menjadi	Satuan	Semula	Menjadi
3.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya							Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan	1	1	Obyek	150,000,000	150,000,000
				Kerontjong Pesisir	1	kegiatan	Kerontjong Pesisir	1	kegiatan						
4	Dinas Komunikasi dan Informatika													125,000,000	125,000,000
4.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital							Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun	1	1	Objek	125,000,000	125,000,000
				1.Pemeliharaan Jaringan Internet dan Wifi	1	paket	1.Pemeliharaan Jaringan Internet dan Wifi	1	paket						
5	Dinas Kesehatan													183,637,500	180,607,700
5.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional							Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional	6	6	unit	183,637,500	183,637,500
				Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	25	dusun	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	25	dusun						
6	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman													20,730,000,000	20,100,830,000
6.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Pengelolaan Taman Budaya	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota							Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan	1	1	lokasi	20,730,000,000	20,100,830,000
				Pembangunan Taman Budaya (Tahap I) - Gerbang Utama; - Pos Satpam; - Pasar Seni Gazebo dan; Penataan	1	lokasi	Pembangunan Taman Budaya (Tahap I) - Gerbang Utama; - Pos Satpam; - Pasar Seni Gazebo dan; Penataan	1	lokasi						

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas Semula			Aktivitas Menjadi			Output Sesuai KEPMENDAGRI				Anggaran	
				Aktivitas	Targe t	Satuan	Aktivitas	Targe t	Satuan	Indikator	Target Semul a	Target Menjad i	Satuan	Semula	Menjadi
				Landspace (Pekerjaan Hardscape, Pekerjaan Softscape, Pekerjaan Elektrikal Landscape, Pekerjaan Mekanikal Landscape, Pekerjaan Landmark, dan Pekerjaan Power House)			Landspace (Pekerjaan Hardscape, Pekerjaan Softscape, Pekerjaan Elektrikal Landscape, Pekerjaan Mekanikal Landscape, Pekerjaan Landmark, dan Pekerjaan Power House)								

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	AKTIVITAS SEMULA			AKTIVITAS MENJADI			OUTPUT SESUAI KEPMENDAGRI				ANGGARAN		
				AKTIVITAS	TARGET	SATUAN	AKTIVITAS	TARGET	SATUAN	INDIKATOR	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	SATUAN	SEMULA	MENJADI	
	Urusan Pertanahan													6.275.530.000	5.779.439.800	
1	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang													6.036.247.000	5.564.091.800	
		Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten												5.018.082.000	4.589.926.800	
			Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten												4.673.419.000	4.245.263.800
1.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	1. Pendaftaran Pengukuran Tanah Kalurahan	1500	Peta Bidang Tanah	1. Pendaftaran Pengukuran Tanah Kalurahan	1500	Bidang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	6	5	Dokumen	4.673.419.000	4.245.263.800	
2. a. Pembuatan Patok Tanah Kalurahan b. Pemasangan Patok Bidang Tanah Kalurahan c. Penyusunan Sket Bidang Tanah Kalurahan				1) 7000 2) 875 3) 875	1) Patok 2) Bidang 3) Bidang	2. a. Pembuatan Patok Tanah Kalurahan b. Pemasangan Patok Bidang Tanah Kalurahan c. Penyusunan Sket Bidang Tanah Kalurahan	a. 7.000 b. 875 c. 875	a. Patok Tanah Desa b. Bidang c. Bidang								
3. Pendaftaran Tanah Kalurahan di Kantor Pertanahan				1050	bidang	3. Pendaftaran Tanah Kalurahan di Kantor Pertanahan	1050	Bidang								

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	AKTIVITAS SEMULA			AKTIVITAS MENJADI			OUTPUT SESUAI KEPMENDAGRI				ANGGARAN	
				AKTIVITAS	TARGET	SATUAN	AKTIVITAS	TARGET	SATUAN	INDIKATOR	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	SATUAN	SEMULA	MENJADI
				Kabupaten Bantul			Kabupaten Bantul								
				4. Pendaftaran Hak Milik Kasultanan	297	bidang	4. Pendaftaran Hak Milik Kasultanan	0	bidang						
				5. Verifikasi Tanah Kalurahan Belum Bersertipikat	875	bidang	5. Verifikasi Tanah Kalurahan Belum Bersertipikat	875	Bidang						
				6. Pendaftaran Sertipikat Tanah Kasultanan	105	bidang	6. Pendaftaran Sertipikat Tanah Kasultanan	105	bidang						
			Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa											344.663.000	344.663.000
1.2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Monitoring dan Evaluasi terhadap pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan di Kabupaten Bantul (75 Kalurahan)	75	Kalurahan	Monitoring dan Evaluasi terhadap pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan di Kabupaten Bantul (75 Kalurahan)	75	Kalurahan	Jumlah dokumen pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa di 75 Kalurahan	4	4	Dokumen	344.663.000	344.663.000
			Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten											1.018.165.000	974.165.000
			Penyiapan bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten											133.165.000	89.165.000
1.3	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Pemanfaatan tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Rekomendasi Bupati / Kepala DPTR Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan di Kabupaten Bantul (20 Rekomendasi)	20	Rekomendasi	Rekomendasi Bupati / Kepala DPTR Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan di Kabupaten Bantul (20 Rekomendasi)	20	Rekomendasi	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	20	20	Dokumen	133.165.000	89.165.000
			Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa											885.000.000	885.000.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	AKTIVITAS SEMULA			AKTIVITAS MENJADI			OUTPUT SESUAI KEPMENDAGRI				ANGGARAN		
				AKTIVITAS	TARGET	SATUAN	AKTIVITAS	TARGET	SATUAN	INDIKATOR	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	SATUAN	SEMULA	MENJADI	
1.4	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Pemanfaatan tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Penanganan Permasalahan Pertanahan di Kabupaten Bantul (56 Berita Acara)	56	Berita Acara	Penanganan Permasalahan Pertanahan di Kabupaten Bantul (56 Berita Acara)	56	Berita Acara	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	56	56	Berita Acara	885.000.000	885.000.000	
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan													239.283.000	215.348.000	
		Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten												239.283.000	215.348.000	
			Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten												239.283.000	215.348.000
2.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Dokumen Peta Batas Kalurahan (21 kalurahan)	21	Kalurahan	Fasilitasi Penegasan Batas Kalurahan	43	Kalurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	21	43	Dokumen	239.283.000	215.348.000	

N O	Perangkat Daerah / PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIAT AN	SEMULA				MENJADI				OUTPUT SESUAI KEPMENDAGRI				ANGGARAN	
				AKTIVITA S	SUB AKTIVITA S	TARGE T	SATUA N	AKTIVITA S	SUB AKTIVITA S			TARGE T	SATUA N	INDIKATOR	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	SATUA N
	Urusan Tata Ruang															1.000.000.000	970.734.100
	Dinas Perhubungan															750.000.000	720.734.100
56	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN	PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS SAMAS - PARANGTRITIS	Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya (19 unit)	Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya (19 unit)	19	Unit	Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya (19 unit)	Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya (19 unit)	19	Unit	JUMLAH DOKUMEN PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS SAMAS - PARANGTRITIS	1	1	Dokumen	570.000.000	547.707.300
57	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN	PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS MAKAM RAJA-RAJA MATARAM DI IMOIRI	Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya (6 unit)	Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya (6 unit)	6	Unit	Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya (6 unit)	Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya (6 unit)	6	Unit	JUMLAH DOKUMEN PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS MAKAM RAJA-RAJA MATARAM DI IMOIRI	1	1	Dokumen	180.000.000	173.026.800
	Dinas Lingkungan Hidup															250.000.000	250.000.000
58	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN	PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS SAMAS - PARANGTRITIS	Jumlah Pathok Penanda Gumuk Pasir (55 unit)	Jumlah Pathok Penanda Gumuk Pasir (55 unit)	55	unit	Jumlah Pathok Penanda Gumuk Pasir (55 unit)	Jumlah Pathok Penanda Gumuk Pasir (55 unit)	55	unit	JUMLAH DOKUMEN PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS SAMAS - PARANGTRITIS	1	1	Dokumen	250.000.000	250.000.000

Sumber: P RPKD Kabupaten Bantul, 2026

Berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2026, dukungan Pemerintah Kabupaten Bantul terhadap Pemerintah Daerah dalam Perubahan KUA Tahun 2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 1 Dukungan Kabupaten Bantul terhadap Prioritas Nasional

PRIORITAS NASIONAL	PAGU
1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5.040.189.500,00
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	27.772.561.759,37
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	135.471.162.571,00
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	681.707.019.772,65
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	8.783.703.046,00
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	107.879.109.684,00
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	381.496.317.258,70
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	15.697.779.932,00
JUMLAH	1.363.847.843.523,72

* Pagu tidak termasuk Program Penunjang kecuali UPT Dinas Kesehatan dan Bagian Organisasi.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan perubahan pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan dan kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan.

Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan tetap diarahkan pada pemanfaatan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA). Target penerimaan pembiayaan yang dicantumkan dalam APBD Murni Tahun 2026 sebesar Rp132.337.458.638,89 menjadi Rp161.043.440.879,50. Penambahan tersebut berasal dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA).

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan tetap diarahkan untuk penyertaan modal (investasi) daerah sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Bantul tetap berkomitmen terhadap alokasi penyertaan modal sebagai bagian dari kewajiban yang dialokasikan di setiap tahunnya. Pengeluaran pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diperkirakan sebesar Rp6.900.000.000,00.

Secara keseluruhan, pembiayaan netto pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diperkirakan meningkat sebesar Rp21.805.982.240,61 dari semula sebesar Rp132.337.458.638,89 menjadi Rp154.143.440.879,50.

Adapun target perubahan pembiayaan daerah Tahun 2026 tercantum dalam Tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1 Realisasi Pembiayaan Tahun 2022 s.d 2025, Pembiayaan APBD Tahun 2026, Realisasi Pembiayaan Semester I Tahun 2026, dan Proyeksi/Target Perubahan Pembiayaan Tahun 2026 di Kabupaten Bantul

No	Uraian	Jumlah (Rp)						
		Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	APBD Tahun 2026	Realisasi TA. 2026 Semester I	Proyeksi/Target Perubahan KUA Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	259.029.014.734,33	215.631.865.732,74	197.220.549.259,59	175.061.744.482,45	132.337.458.638,89	161.958.236.368,50	161.043.440.879,50
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	240.503.861.658,33	215.631.865.732,74	196.239.211.759,59	173.920.250.697,45	132.337.458.638,89	161.043.440.879,50	161.043.440.879,50
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan	18.362.654.076,00		981.337.500,00	1.141.493.785,00		914.795.489,00	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	162.499.000,00						
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	31.500.000.000,00	24.051.093.800,00	16.700.000.000,00	25.375.550.000,00	0,00	0,00	6.900.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	31.500.000.000,00	24.051.093.800,00	16.700.000.000,00	25.375.550.000,00	0,00	0,00	6.900.000.000,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah							
	Pembiayaan Netto	227.529.014.734,33	191.580.771.932,74	180.520.549.259,59	149.686.194.482,45	132.337.458.638,89	161.958.236.368,50	154.143.440.879,50
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	215.631.865.732,74	196.239.211.759,59	173.920.250.697,45	161.043.440.879,50	0,00	255.245.233.109,15	0,00

Sumber: BPKPAD, 2026

Rincian perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.2

Rincian APBD Tahun 2026 dan Proyeksi Perubahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026

KODE	URAIAN	APBD TA 2026	PERUBAHAN KUA TA 2026	Bertambah (Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	753.349.327.920,00	755.242.070.930,00	1.892.743.010,00
4.1.01	Pajak Daerah	408.211.152.680,00	408.211.152.680,00	-
4.1.02	Retribusi Daerah	251.312.134.106,00	251.312.134.106,00	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.199.694.868,00	20.199.694.868,00	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	73.626.346.266,00	75.519.089.276,00	1.892.743.010,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.557.870.627.410,00	1.584.453.140.209,00	26.582.512.799,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.380.125.281.000,00	1.405.655.795.756,00	25.530.514.756,00
4.2.01.05	Dana Desa	102.690.399.000,00	102.690.399.000,00	-
4.2.01.06	Insentif Fiskal	-	-	-
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	12.747.285.000,00	12.747.285.000,00	-
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	914.464.154.000,00	940.333.075.000,00	25.868.921.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	350.223.443.000,00	349.885.036.756,00	(338.406.244,00)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	177.745.346.410,00	178.797.344.453,00	1.051.998.043,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	108.340.869.652,00	111.871.983.501,00	3.531.113.849,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	69.404.476.758,00	66.925.360.952,00	(2.479.115.806,00)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-
4.3.01	Pendapatan Hibah			-
	Jumlah Pendapatan	2.311.219.955.330,00	2.339.695.211.139,00	28.475.255.809,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	1.964.789.992.422,29	2.013.579.349.379,57	48.789.356.957,28
5.1.01	Belanja Pegawai	1.002.139.576.313,04	1.013.920.765.355,04	11.781.189.042,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	869.798.749.699,25	906.782.067.614,53	36.983.317.915,28
5.1.05	Belanja Hibah	88.181.866.410,00	88.321.716.410,00	139.850.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.669.800.000,00	4.554.800.000,00	(115.000.000,00)
5.2	BELANJA MODAL	160.425.656.347,60	163.518.440.656,60	3.092.784.309,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.052.115.908,00	41.004.588.150,00	2.952.472.242,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.352.886.415,60	29.089.078.219,60	(263.808.196,00)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	84.233.782.002,00	85.035.058.919,00	801.276.917,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.786.872.022,00	8.389.715.368,00	(397.156.654,00)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	3.398.173.783,33	(1.601.826.216,67)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	3.398.173.783,33	(1.601.826.216,67)
5.4	BELANJA TRANSFER	313.341.765.199,00	313.342.688.199,00	923.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	37.271.261.169,00	37.271.261.169,00	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	276.070.504.030,00	276.071.427.030,00	923.000,00
	Jumlah Belanja	2.443.557.413.968,89	2.493.838.652.018,50	50.281.238.049,61
	Total Surplus/(Defisit)	(132.337.458.638,89)	(154.143.440.879,50)	(21.805.982.240,61)

KODE	URAIAN	APBD TA 2026	PERUBAHAN KUA TA 2026	Bertambah (Berkurang)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	132.337.458.638,89	161.043.440.879,50	28.705.982.240,61
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	132.337.458.638,89	161.043.440.879,50	28.705.982.240,61
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	6.900.000.000,00	6.900.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	6.900.000.000,00	6.900.000.000,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah			-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	6.900.000.000,00	6.900.000.000,00
	Pembiayaan Netto	132.337.458.638,89	154.143.440.879,50	21.805.982.240,61
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-
	TOTAL APBD	2.443.557.413.968,89	2.500.738.652.018,50	57.181.238.049,61

Sumber: BPKPAD, 2026

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Permasalahan Pembangunan Daerah Tahun 2026

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Oleh karena itu, perumusan permasalahan pembangunan daerah diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah pada semester 1 tahun 2026 secara umum dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) aspek utama:

1. Aspek Administratif dan Tata Kelola Keuangan

Adanya jeda waktu penyerapan anggaran, keterlambatan Uang Persediaan (UP), keterbatasan anggaran Ganti Uang (GU) untuk kegiatan skala kecil di bawah Rp50 juta, serta pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memerlukan penyesuaian administrasi.

2. Aspek Teknis Perangkat Daerah

Proses pengadaan barang/jasa yang tertahan di tahap persiapan berkas, keterlambatan pengiriman barang dari penyedia, serta rendahnya integrasi sistem satu data antarsektoral.

3. Aspek Eksternal dan Regulasi Makro

Dinamika makro ekonomi berupa lonjakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan harga material konstruksi di pasar memicu terjadinya gagal tender pada klaster infrastruktur jalan dan jembatan, serta adanya penyesuaian regulasi perhitungan harga pada aplikasi INAPROC Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Untuk merumuskan langkah mitigasi yang tepat pada Semester II dan memberikan umpan balik bagi penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan KUA Tahun 2027, permasalahan di tingkat lapangan diuraikan berdasarkan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Perangkat Daerah.

Secara ringkas, perumusan masalah per urusan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 7.1 Matriks Perumusan Masalah Pembangunan Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2026

No	Urusan Penyelenggaraan / Perangkat Daerah	Kegiatan Terhambat	Akar Permasalahan Utama	Keterangan
1	Pendidikan	- Pengadaan Perlengkapan/Mebel Sekolah - Pembangunan Rkb Dan Rehab Laboratorium - Pengadaan Kain Seragam Sd Dan Smp - Pembayaran Bosnas Dan TPG - Sewa Tanah SSA	Proses administrasi persiapan lelang yang lambat serta diperlukannya reviu ulang HPS oleh APIP. - Terlambatnya data NISN/Rombel masuk ke Arkas dan terlambatnya sinkronisasi jam mengajar Tendik di Dapodik - Menunggu apprisial regulasi pemanfaatan tanah Kasultanan	- Realisasi fisik sempat tertahan 0% - 5% di Semester I - Penambahan anggaran untuk Bosnas, TPG dan Sewa tanah SSA
2	Kesehatan	- Pelayanan Kesehatan ODHIV/ODHA - Pelayanan Kesehatan Lingkungan - Pengadaan Alat Kesehatan	Keterlambatan distribusi logistik kesehatan dari penyedia; kendala multisektoral sanitasi (kapasitas IPLT terbatas); serta konstruksi gedung fisik penunjang yang belum selesai.	Capaian komposit pelayanan kesehatan masyarakat tidak berjalan linier dengan jadwal ideal.
3	Pekerjaan Umum	- Pembangunan Jalan dan Jembatan (Klaster Proyek Strategis) - Penatausahaan Rusunawa	Lonjakan harga BBM dan material konstruksi di pasar memicu kegagalan tender; keterbatasan fiskal daerah memaksa dilakukannya rasionalisasi	Penyerapan belanja modal tertahan di angka 15,52% dan terjadi beban kerja tertunda. Penambahan anggaran untuk

No	Urusan Penyelenggaraan / Perangkat Daerah	Kegiatan Terhambat	Akar Permasalahan Utama	Keterangan
		Peningkatan SR Air Minum Aman dan SR Pengolahan Air Limbah Domestik Aman	ruang lingkup kerja.	menambah volume output
4	Lingkungan Hidup	Pemanfaatan Ruang SRS Pantai Samas-Paragtritis	Proses pengadaan logistik dan administrasi kontrak mengalami keterlambatan.	Penandatanganan kontrak baru bisa dilaksanakan pada akhir Semester I.
5	Komunikasi & Informatika	- Pengelolaan TIK dan Kebijakan Satu Data - Tata Kelola Persandian dan Konten Publik	Terjadinya <i>silo data</i> (ego sektoral perangkat daerah), keterbatasan infrastruktur <i>command center</i> , dan belum tersusunnya SOP keamanan informasi komprehensif.	Progres fisik TIK macet di angka 23% - 41% dan integrasi aplikasi dalam rangka mewujudkan satu data terhambat.
6.	Perencanaan dan litbang	Peralatan dan Perlengkapan Kantor, gedung	Sarana dan prasarana peralatan kantor banyak yang sudah tidak layak pakai/rusak	Menurunnya produktivitas kerja serta menghambat efisiensi penyusunan dokumen perencanaan daerah sehingga perlu adanya pergeseran dan penambahan anggaran
7	Kepegawaian)	Pos Belanja Pegawai Makro	Adanya aparatur yang pensiun, mutasi, dan promosi yang menyisakan kekosongan formasi pegawai aktif.	Adanya anggaran belanja pegawai yang menganggur padahal telah diplot penuh di awal tahun.
8	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	Pendampingan Hukum Bagi Warga Miskin	Pengajuan permohonan layanan bantuan hukum oleh masyarakat	Layanan bantuan hukum masyarakat miskin yang telah terverifikasi belum bisa terbayarkan

No	Urusan Penyelenggaraan / Perangkat Daerah	Kegiatan Terhambat	Akar Permasalahan Utama	Keterangan
			miskin sampai bl. Juli tahun 2026 lebih besar dari anggaran yang tersedia	sehingga perlu adanya penambahan anggaran
9	Sekretariat Daerah (bagian Kesra)	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Anggaran untuk fasilitasi Kegiatan Natal Tahun 2026 belum mencukupi (baru makan minum rapat untuk prosesi perayaan natal belum teranggarkan)	Fasilitasi Kegiatan Natal tahun 2026 tidak dapat dilaksanakan sehingga perlu adanya penambahan anggaran
10	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)	Koordinasi, konsultasi, konsolidasi	Anggaran untuk kegiatan koordinasi, konsultasi kebijakan daerah ke Pusat, konsolidasi belum mencukupi	Penambahan anggaran
11	Dinas Sosial	Penyelesaian kegiatan pendataan Desa cinta Statistik	Pendataan belum terlaksana 100%	Dilakukan penambahan anggaran
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Belum semua pekerja rentan tahun 2026 mendapat bantuan iuran	Bantuan iuran bagi 2682 pekerja rentan selama 4 bulan	Dilakukan penambahan anggaran
13	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	DED pasar Mangiran, Bantul dan Piyungan	Belum disusunnya DED pasar Mangiran, Bantul dan Piyungan	Dilakukan penambahan anggaran
14	Dinas Pariwisata	Retribusi dan pemeliharaan OW	Pengendalian Retribusi Pariwisata, Cetak Karcis, Pemindahan Baliho Dan	Dilakukan penambahan anggaran

No	Urusan Penyelenggaraan / Perangkat Daerah	Kegiatan Terhambat	Akar Permasalahan Utama	Keterangan
			Pemeliharaan OW Goa Selarong	
15	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Kebutuhan sarpras , pemeliharaan gedung dan BTT	GTT, sharing IPAL Sewon, rehap ruang BPK, rehap BLK, sarpras	Dilakukan penambahan anggaran

Sumber: P RKPD Kabupaten Bantul, 2026

Perumusan permasalahan pembangunan daerah di atas dilakukan terhadap setiap bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan semester I Tahun 2026.

Hasil perumusan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2026 sampai dengan triwulan 2. diperlukan perubahan rencana program dan kegiatan prioritas pada setiap Perangkat Daerah. Perubahan tersebut meliputi:

1. Belanja
- a. penambahan kegiatan bersumber SiLPA DAK Non Fisik Tahun 2025.

b. pergeseran pagu antar kegiatan/sub kegiatan ataupun belanja;

c. penambahan dan pengurangan pagu kegiatan/sub kegiatan;

d. penambahan dan pengurangan target kinerja;

e. perubahan lokasi kegiatan; dan

f. perubahan kelompok sasaran kegiatan.

2. Pendapatan

Penyesuaian target pendapatan dan dana transfer daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi pada Semester I Tahun 2026 selanjutnya dilakukan pencermatan program dan kegiatan untuk mengidentifikasi kegiatan yang dapat dilakukan percepatan maupun yang tidak dapat dilaksanakan sampai akhir tahun anggaran dengan memperhatikan:

- 1) Keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan;

2) Hasil dan manfaat yang diharapkan; dan

3) Efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

7.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026

Penyusunan Perubahan KUA Tahun 2026 mengacu dokumen RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021–2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 dengan berpedoman pada tema pembangunan RPJPD Tahap I yaitu **“Penguatan Fondasi Transformasi”** dan sasaran strategis RPJMD tahun 2025-2029, disusun tahapan pembangunan jangka menengah. Penahapan tahunan pembangunan yang menjadi fokus RKPD Tahun 2026 adalah: **Penguatan Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan Didukung SDM Berkualitas dan Infrastruktur Berkelanjutan.**

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, disusun tema dan prioritas pembangunan tahun 2026. Tema dan prioritas pembangunan tahun 2026 yaitu **Penguatan Ekonomi berbasis sektor unggulan didukung SDM Berkualitas dan Infrastruktur Berkelanjutan.** Prioritas daerah pada tahun 2026 adalah:

- PD-1:** Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.
- PD-2:** Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
- PD-3:** Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.
- PD-4:** Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.
- PD-5:** Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Tema dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 selanjutnya diselaraskan untuk mendukung Tema dan Prioritas Nasional dan DIY. Penyelarasan Tema dan Prioritas Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 dalam mendukung Prioritas Nasional, sebagai berikut:

Tabel 7.2 Penyelarasan Tema dan Prioritas Nasional dengan Prioritas Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026

	NASIONAL		KABUPATEN BANTUL
A.	TEMA		
	Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi yang Produktif dan Inklusif		Penguatan Ekonomi berbasis sektor unggulan didukung SDM Berkualitas dan Infrastruktur Berkelanjutan
B.	PRIORITAS		
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	5	Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi digital, Ekonomi Digital, dan Ekonomi Biru	3	Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	4	Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1	Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di dalam Negeri	3	Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3	Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	2	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	5	Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya

Sumber : P RKPDP Kabupaten Bantul, 2026

Selanjutnya penyelarasan terhadap prioritas pembangunan Daerah DIY ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 7.3 Penyelarasan Tema dan Prioritas DIY dengan Prioritas Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026

	DIY		KABUPATEN BANTUL	
A.	TEMA			
	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi		Penguatan Ekonomi berbasis sektor unggulan didukung SDM Berkualitas dan Infrastruktur Berkelanjutan	
B.	PRIORITAS			
	1	Penurunan tingkat kemiskinan	3	Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi
	2	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak		
	3	Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta	1	Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia
	4	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	3	Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi
	5	Penguatan <i>Good-governance</i> pada berbagai tingkatan	2	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan
	6	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram	4	Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya
5			Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	

Sumber: P RKPD Kabupaten Bantul 2026

Dalam rangka percepatan perwujudan visi dan misi, terdapat 13 Program Unggulan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang meliputi:

1. Peningkatan kemantapan jalan di Kabupaten.
2. Swasembada pangan melalui pembebasan PBB lahan pertanian pangan berkelanjutan serta fasilitasi pembuatan pupuk organik dan benih tanaman pangan dan hortikultura.
3. Penanganan permasalahan kemiskinan, stunting, dan masalah strategis kewilayahan padukuhan melalui penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Padukuhan (PPBMP).
4. Pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata unggulan dan fasilitas olahraga *jogging track*.
5. Penuntasan pengelolaan sampah dengan pemanfaatan teknologi modern, budaya bersih dan penegakan hukum.

6. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan wirausahawan muda dan pembangunan kawasan industri.
7. Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir.
8. Optimalisasi penanganan masalah kemanusiaan, masalah sosial, dan peningkatan pelayanan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).
9. Pengembangan SDM birokrasi yang kreatif dan kolaboratif serta penuntasan reformasi pelayanan publik.
10. Perluasan jaringan telekomunikasi untuk mendukung pengembangan layanan digital dan peningkatan keamanan.
11. Penguatan layanan kesehatan promotif, preventif, dan peningkatan status gizi masyarakat.
12. Peningkatan kualitas pendidikan melalui pemenuhan sarana prasarana, profesionalitas guru dan tenaga kependidikan serta bantuan bagi pelajar berprestasi.
13. Pelestarian budaya, guyub rukun dan gotong royong untuk mewujudkan keharmonisan dan ketenteraman masyarakat.

Program unggulan tersebut diterjemahkan kedalam program perangkat daerah yang memiliki kesamaan atau kemiripan *outcome* yang akan dihasilkan. Daftar program perangkat daerah yang mendukung pelaksanaan program unggulan tersebut disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 7.4 Interkoneksi Pendekatan Prioritas, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Bantul dengan Program Unggulan dan Program Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul

PRIORITAS DAERAH	TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Tujuan: Meningkatkan Daya Saing dan Produktivitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan kualitas pendidikan melalui pemenuhan sarana prasarana, profesionalitas guru dan tenaga kependidikan serta bantuan bagi pelajar berprestasi	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pendidikan,	Penguatan layanan kesehatan promotif, preventif, dan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS DAERAH	TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
	Kesehatan, dan Standar Hidup Masyarakat	peningkatan status gizi masyarakat	Upaya Kesehatan Masyarakat	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Tujuan: Meningkatkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	Pengembangan SDM birokrasi yang kreatif dan kolaboratif serta penuntasan reformasi pelayanan publik	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Sasaran: Meningkatkan Kinerja Pembangunan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat Daerah
		Perluasan jaringan telekomunikasi untuk mendukung pengembangan layanan digital dan peningkatan keamanan	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Tujuan: Meningkatkan Ketangguhan Perekonomian Daerah	Swasembada pangan melalui pembebasan PBB lahan pertanian pangan berkelanjutan serta fasilitasi pembuatan pupuk organik dan benih tanaman pangan dan hortikultura	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	Sasaran: Meningkatkan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Penatagunaan Tanah	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
	Sasaran: Meningkatkan Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja dan Mendorong Kewirausahaan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan wirausahawan muda dan pembangunan kawasan industri	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

PRIORITAS DAERAH	TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata unggulan dan fasilitas olahraga <i>jogging track</i> .	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
	Tujuan: Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan	Optimalisasi penanganan masalah kemanusiaan, masalah sosial, dan peningkatan pelayanan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
	Sasaran: Meningkatnya Pendapatan penduduk		Program Pemberdayaan Sosial	
			Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulang an Bencana Daerah

PRIORITAS DAERAH	TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
		Penanganan permasalahan kemiskinan, stunting, dan masalah strategis kewilayahan padukuhan melalui penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Padukuhan (PPBMP)	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Tujuan: Mengembangkan wilayah dengan Infrastruktur yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Peningkatan kemantapan jalan di Kabupaten	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Sasaran: Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar	Pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata unggulan dan fasilitas olahraga <i>jogging track</i> .	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup

PRIORITAS DAERAH	TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Penuntasan pengelolaan sampah dengan pemanfaatan teknologi modern, budaya bersih dan penegakan hukum.	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
		Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
			Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikas dan Informatika
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan

PRIORITAS DAERAH	TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulang an Bencana Daerah
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Tujuan: Meningkatkan Keharmonisan Daerah	Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan
		Pelestarian budaya, guyub rukun dan gotong royong untuk mewujudkan keharmonisan dan ketenteraman masyarakat.		
	Sasaran: Meningkatnya Pelestarian Budaya		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
	Sasaran: Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban dan Kenyamanan Daerah	Penuntasan pengelolaan sampah dengan pemanfaatan teknologi modern, budaya bersih dan penegakan hukum		

Sumber: P RKPD Kabupaten Bantul, 2026

Program Strategis Nasional (ProSN) adalah penerjemahan program/proyek yang tercantum dalam RPJMN dan RKP yang memiliki sifat strategis dan menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia serta menjaga keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Interkoneksi Program Strategis Nasional (ProSN) dengan Program Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.5 Interkoneksi Program Strategis Nasional (ProSN) dengan Program Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul

No	Pro-SN	Proyek/Kegiatan	Outcome Proyek/Kegiatan	Indikator Outcome	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Pengentasan Kemiskinan	Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Menurunnya Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem	Tingkat Kemiskinan	Sosial		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
								1.06.05.2.020.008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
						Pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
							PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.020.008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

No	Pro-SN	Proyek/Kegiatan	Outcome Proyek/Kegiatan	Indikator Outcome	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
						Lingkungan Hidup	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.2.010.001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
		Pembangunan 3 Juta Rumah	Meningkatnya Akses Rumah Tangga terhadap Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Perumahan dan Kawasan Permukiman		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
							PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
								1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Terhadap Kumuh

No	Pro-SN	Proyek/Kegiatan	Outcome Proyek/Kegiatan	Indikator Outcome	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
									dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru
						Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penataan Bangunan Gedung	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
2	Ketahanan Pangan	Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan	Terlaksananya jaringan irigasi Swasembada Pangan yang Berkelanjutan	Tingkat Kesiapan Teknis dan Operasi Pemeliharaan Irigasi untuk Mendukung	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

No	Pro-SN	Proyek/Kegiatan	Outcome Proyek/Kegiatan	Indikator Outcome	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
				Swasembada Pangan					
		Pangan Akuatik	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Produksi Perikanan Tangkap	Kelautan dan Perikanan	Perdagangan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
		Kampung Nelayan	Terwujudnya tata kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Sektor Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Perdagangan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
3	Kesehatan Untuk Semua	Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting	Pencegahan dan Penurunan Stunting.	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek)	Kesehatan		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
								1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
						Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

No	Pro-SN	Proyek/Kegiatan	Outcome Proyek/Kegiatan	Indikator Outcome	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
						Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
		Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Meningkatnya Masyarakat Kelompok Usia Bayi, Balita, Remaja, Dewasa, dan Lansia yang Menerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis sebagai Upaya Deteksi Dini, Pencegahan Penyakit, dan Pengurangan Potensi Beban Anggaran Pengendalian Penyakit	Persentase Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Kesehatan		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
								1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
								1.02.02.2.02.0038	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular
						Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.2.02.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
		Jaminan Kesehatan Nasional	Memperkuat Kapasitas JKN dan Pendanaan Kesehatan dalam Mendukung	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Kesehatan		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

No	Pro-SN	Proyek/Kegiatan	Outcome Proyek/Kegiatan	Indikator Outcome	Pengampu Bidang Urutan Utama	Bidang Urutan Terkait	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
			Pembangunan Kesehatan.				UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
						Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/kota
						Administrasi Kependuduk an dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
		Penuntasan Tuberkulosis (TBC) melalui Peningkatan Upaya Pencegahan TBC, Intensifikasi Penemuan Kasus Secara Masif dan Pengobatan TBC Sampai Tuntas	Tercapainya Penuntasan TBC	Cakupan Penemuan Kasus TBC	Kesehatan		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
								1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis
						Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
						Administrasi Kependuduk an dan	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan

No	Pro-SN	Proyek/Kegiatan	Outcome Proyek/Kegiatan	Indikator Outcome	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
						Pencatatan Sipil	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		
		Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas Rumah Sakit Tipe atau Kelas D Menjadi C melalui Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas di Rumah Sakit Daerah	Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai Standar	Kesehatan		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit
		Makan Bergizi Gratis	Meningkatnya Asupan Gizi dan Pengetahuan Gizi Kelompok Sasaran	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat ; Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Pendidikan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
						Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran

No	Pro-SN	Proyek/Kegiatan	Outcome Proyek/Kegiatan	Indikator Outcome	Pengampu Bidang Urutan Utama	Bidang Urutan Terkait	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
									dan Depot Air Minum (DAM)
						Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko
4	Perluasan Akses Pendidikan	Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Sekolah Unggulan Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 Tahun dalam Pendidikan Menengah; Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk dalam Penduduk Disabilitas yang	Pendidikan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
								1.01.02.1.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
								1.01.02.1.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan

No	Pro-SN	Proyek/Kegiatan	Outcome Proyek/Kegiatan	Indikator Outcome	Pengampu Bidang Urutan Utama	Bidang Urutan Terkait	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
				Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus					Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
5	Pertumbuhan Ekonomi	Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan) - Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Lingkungan Hidup	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0012	Penanganan Sampah melalui Pengangkutan
							PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan

Sumber: P RKPD Kabupaten Bantul,

7.3 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, SPM merupakan sebagian substansi pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang terdiri dari:

- 1. SPM Bidang Pendidikan;
- 2. SPM Bidang Kesehatan;
- 3. SPM Bidang Pekerjaan Umum;
- 4. SPM Bidang Perumahan Rakyat;
- 5. SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
- 6. SPM Bidang Sosial.

Ketentuan penerapan SPM di lingkungan pemerintah daerah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan jenis dan indikator pelayanan dasar yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

Tabel 7.6 Jenis dan Indikator Pelayanan SPM yang Harus Dipenuhi

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian
I. SPM PENDIDIKAN			
1. Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap tahun
2. Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	Setiap tahun
3. Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap tahun
II. SPM KESEHATAN			
1. Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian
4. Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehtan	100%	Setiap tahun
III. SPM PEKERJAAN UMUM			
1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari	100%	Setiap tahun
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap tahun
IV. SPM PERUMAHAN RAKYAT			

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian
1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap tahun
V. SPM KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten/Kota	100%	Setiap tahun
2. Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap tahun
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap tahun
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap tahun
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap tahun
VI. SPM SOSIAL			
1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun
3. Rehabilitasi sosial dasar	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang	100%	Setiap tahun

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian
lanjut usia terlantar di luar panti	memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	Setiap tahun
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	Setiap tahun

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021

Dalam rangka mendukung penerapan SPM tersebut, Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029 dengan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029.

7.4 Strategi Pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah

Strategi pencapaian prioritas pembangunan daerah dalam Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Bantul diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan kapasitas fiskal melalui penyesuaian pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah secara selektif, efektif, dan efisien. Kebijakan perubahan anggaran dilaksanakan dengan tetap menjaga konsistensi terhadap RKPD Tahun 2026 dan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025–2029, serta difokuskan pada percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah melalui penguatan infrastruktur berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, reformasi pelayanan publik, pengembangan sektor unggulan berbasis inovasi, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta penguatan ketahanan daerah terhadap bencana. Selain itu, perubahan anggaran diarahkan untuk mengakomodasi perkembangan kondisi ekonomi, dinamika kebijakan nasional, hasil evaluasi pelaksanaan APBD semester pertama, dan kebutuhan pendanaan atas kegiatan prioritas yang

memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dalam penyusunan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Bantul, strategi pencapaian prioritas pembangunan daerah perlu diarahkan pada penyesuaian kebijakan fiskal tanpa mengubah sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD 2026. KUA-PPAS Perubahan berfungsi untuk mengakomodasi perkembangan kondisi ekonomi, perubahan regulasi, capaian kinerja semester I, serta kebutuhan pendanaan yang bersifat mendesak dan prioritas. RKPD 2026 sendiri menjadi pedoman utama penyusunan KUA dan PPAS.

Strategi yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan konsistensi dengan RKPD dan RPJMD 2025–2029
 - a) Memastikan seluruh perubahan anggaran tetap mendukung tema pembangunan RKPD 2026, yaitu penguatan ekonomi berbasis sektor unggulan didukung SDM berkualitas dan infrastruktur berkelanjutan.
 - b) Menjaga kesinambungan pencapaian target indikator kinerja daerah.
2. Memprioritaskan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator makro daerah seperti pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, penurunan stunting, pengangguran, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Memperkuat efektivitas belanja daerah
 - a) Mengutamakan belanja yang bersifat produktif dibanding belanja administratif.
 - b) Memastikan efisiensi belanja operasional sehingga ruang fiskal bagi belanja pembangunan semakin besar.
4. Mengakselerasi program prioritas pembangunan daerah Fokus diarahkan pada:
 - a) pembangunan infrastruktur berkelanjutan;
 - b) peningkatan kualitas SDM;
 - c) reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik;
 - d) penguatan sektor unggulan daerah (UMKM, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif);
 - e) peningkatan kualitas lingkungan hidup serta mitigasi bencana.

5. Mengoptimalkan pendapatan daerah
 - a) Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - b) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
 - c) Peningkatan kualitas pelayanan perpajakan dan retribusi daerah.
6. Menjamin keberlanjutan proyek strategis
 - a) Memberikan dukungan pendanaan yang memadai terhadap proyek strategis yang telah ditetapkan agar tidak mengalami keterlambatan pelaksanaan.
 - b) Melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan serapan anggaran.
7. Memperkuat tata kelola dan akuntabilitas
 - a) Menyusun perubahan anggaran berdasarkan data kinerja dan evaluasi semester I.
 - b) Mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah.

BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Bantul, 13 Agustus 2026

PIMPINAN DPRD

KETUA DPRD KABUPATEN BANTUL
HANUNG RAHARJO

BUPATI BANTUL

BUPATI KABUPATEN BANTUL
ABDUL HALIM MUSLIH